



POHON KINERJA KEPALA BADAN

DASAR HUKUM



1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJMN Tahun 2005-2025
3. UU No. 20 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6. PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang
9. PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. PP No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024

13. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Raperda, RPJPD, RPJMD dan Perubahannya
14. Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM
15. Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang SIPD
16. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012- 2032
19. Perda Provinsi Bengkulu No. 15 Tahun 2013 Tentang RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
20. Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025
21. Perda No. 8 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031
22. Perda No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
23. Perbup No. 51 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang **perencanaan** dan bidang **penelitian** dan **pengembangan** yang menjadi kewenangan kabupaten dan **tugas pembantuan** yang diberikan kepada kabupaten

FUNGSI :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Perumusan, pelaksanaan, pengendallian dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD
4. Perumusan kebijakan, peyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang perencanaan dan litbang
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

URUSAN : Penunjang

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

VISI

Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas Berlandaskan Cinta-BS

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi



MISI 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya
Akuntabilitas Daerah

Indikator

Nilai SAKIP

Tujuan OPD 1

Meningkatnya kualitas perencanaan
dan pengukuran kinerja

Indikator

Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja

SASARAN

Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja

Indikator

Nilai perencanaan kinerja

Meningkatnya kualitas
pengukuran kinerja

Indikator

Nilai pengukuran kinerja

Indeks Daya Saing Daerah

SASARAN

Meningkatnya Daya Saing
Penyelenggaraan
Pemerintah

Indikator

Indeks Daya Saing Daerah

Tujuan OPD 2

Mewujudkan capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

Indeks inovasi daerah

SASARAN

Meningkatnya capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

Indeks inovasi daerah

TARGET KINERJA DAERAH DARI OPD

NO	INDIKATOR	AWAL	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
I	IKU DAERAH						
	INDEKS DAYA SAING DAERAH	2,1410/Sedang	3,00/Tinggi	3,50/Tinggi	3,76/Sangat Tinggi	4,00/Sangat Tinggi	4,00/Sangat Tinggi
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	41,16/C	65/B	70/B	75/BB	80/A	80/A
	NILAI SAKIP	58,38/CC	70/BB	80/A	80/A	85/A	85/A
II	IKU OPD						
	NILAI PERENCANAAN KINERJA	20,29	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	NILAI PENGUKURAN KINERJA	13,99	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	INDEKS INOVASI DAERAH	668/Inovatif	60,00-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	80,01-85,00
III	IKU SEKRETARIAT						
	NILAI AKIP	80,00/A	80,00/A	85,00/A	90,00/A	90,00/A	90,00/A
	INDEKS KEPUASAN ASN	75	75	80	85	90	90
	PENGELOLAAN KEUANGAN						
	TGR	0	0	0	0	0	0
	ADMINISTRATIF	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INOVASI BAPPEDA LITBANG

NO	BIDANG	INOVASI
1	P2EPD	SIPPUAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)
		SIPDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
		E-PLANNING
		E-MONEV
		APLIKASI SATU DATA
		KRISNA DAK
2	PPM	TUNAS SEMAKU (Setum Dinas Sejahterakan Masyarakat Umum)
3	PSI	Sistem Pengarsipan Yang Mengadopsi Gramedia
		SI INFORMAN (Sistem Informasi Peternakan)
		OPD AWARD (PENGHARGAAN OPD TERHADAP PERENCANAAN YANG BAIK)
4	LITBANG	KLINIK INOVASI
		AGEN INOVASI
		DEWA CINTA (Dengan Whatsapp Ceritakan dan Sampaikan Tanggapan Anda)

KOMPONEN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

I. ASPEK EKOSISTEM INOVASI

1. PILAR DINAMIKA BISNIS :

- a. Regulasi (perizinan, SOP, dan lain-lain)
- b. Kewirausahaan

2. PILAR KAPASITAS INOVASI :

- a. Interaksi dan Keberagaman
- b. Penelitian dan Pengembang (Litbang)

3. PILAR KESIAPAN TEKNOLOGI :

- a. Telematika
- b. Teknologi

II. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

1. PILAR KELEMBAGAAN

- a. Tata Kelola Pemerintahan
- b. Keamanan dan Ketertiban

2. PILAR INFRASTRUKTUR

- a. Infrastruktur Transportasi
- b. Infrastruktur Air Bersih, RTH, dan Kelistrikan

3. PILAR PEREKONOMIAN DAERAH

- a. Keuangan Daerah
- b. Stabilitas Ekonomi

III. ASPEK SUMBERDAYA/HUMAN CAPITAL

1. PILAR KESEHATAN :

- a. Kesehatan

2. PILAR PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN :

- a. Pendidikan

- b. Keterampilan

IV. ASPEK PASAR/MARKET

1. PILAR EFISIENSI PASAR PRODUK :

- a. Kompetensi Dalam Negeri

- b. Stabilitas Harga

2. PILAR KETENAGAKERJAAN :

- a. Ketenagakerjaan

- b. Kapasitas Tenaga Kerja

3. PILAR AKSES KEUANGAN :

- a. Akses Keuangan

4. PILAR UKURAN PASAR

Sumber :
“RISTEK-BRIN”

KOMPONEN INDEKS INOVASI DAERAH

1. REGULASI DAERAH
2. KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI
3. DUKUNGAN ANGGARAN
4. PENGGUNAAN IT
5. BIMTEK INOVASI
6. PROGRAM DAN KEGIATAN DI RENSTRA OPD
7. JEJARING INOVASI
8. REPLIKASI
9. PEDOMAN TEKNIS
10. PENGELOLA INOVASI
11. KETERSEDIAAN INFORMASI LAYANAN
12. PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN
13. TINGKAT PARTISIPASI STAKE HOLDER
14. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN
15. KEMUDAHAN PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
16. ONLINE SYSTEM
17. KECEPATAN INOVASI
18. KEMANFAATAN INOVASI

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Indikator

IMPACT/DAMPAK :

1. Ease Of Doing Business
2. Corruption Perception Index
3. Government Effectiveness Index
4. Trust Barometer

Indikator Outcome 2

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Outcome 1

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL :

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi
2. Nilai SAKIP
3. Opini BPK

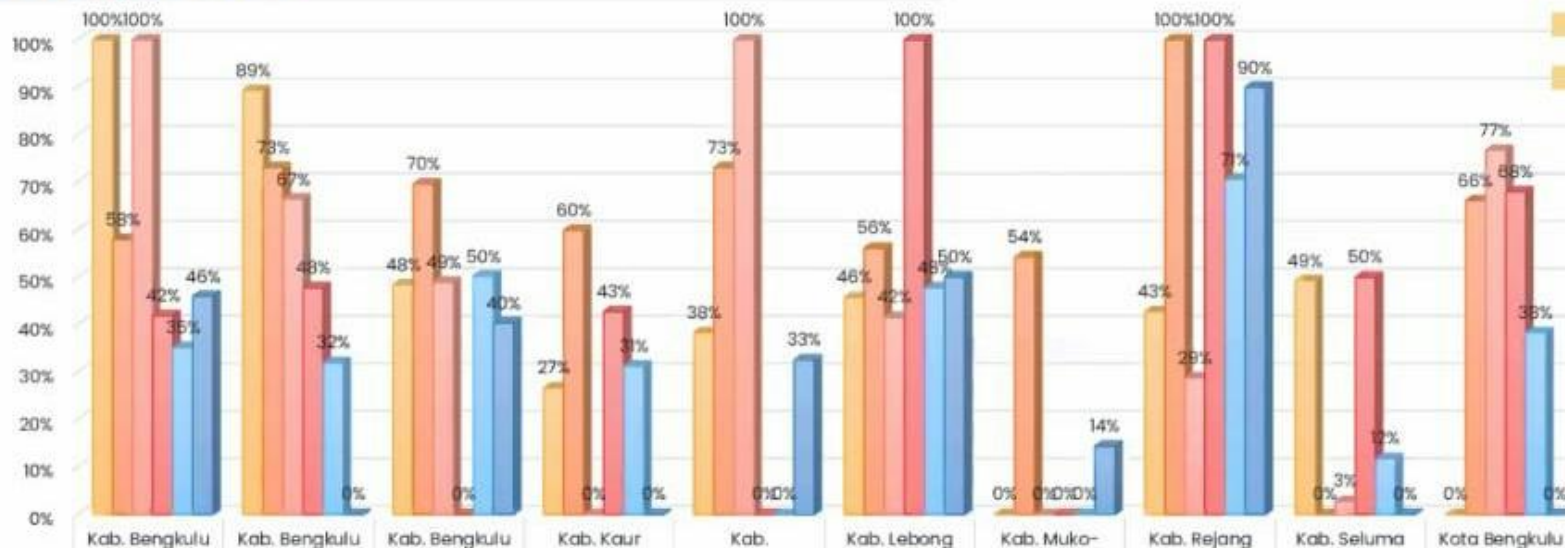
BIROKRASI YANG KAPABEL :

1. Indeks Kelembagaan
2. Indeks SPBE
3. Indeks Profesionalitas ASN

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA :

1. Indeks Pelayanan Publik

CAPAIAN SPM KAB/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU SELURUH BIDANG 2020



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

PENGERTIAN

Perencanaan :

Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi, merumuskan sistem dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan untuk tercapainya tujuan

Proses penentuan hal-hal yang ingin dicapai serta penentuan berbagai tahapan yang diperlukan

Fungsi manajemen pertama yang penting, merupakan tahap awal dalam kegiatan sebuah organisasi

Penelitian :

Proses pemecahan masalah dengan melakukan pendekatan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis

Suatu cara yang sistematis yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan serta diuji

Pengembangan :

Proses menyebarkan/memperluas/mengembangkan sesuatu ke lokasi yang lebih luas/sasaran yang lebih luas

Litbang :

Proses atau langkah-langkah untuk produk atau temuan

URUTAN PROSES :

LIT = Penelitian

KAJI = Pengkajian

BANG = Pengembangan

LUH = Penyuluhan

RAP = Penerapan

EVIDENCE/BUKTI/DOKUMEN PMPRB BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. SK TIM PMPRB
2. NOTULEN RAPAT/PHOTO
3. SK AGEN OF CHANGE
4. WA GRUP
5. ANJAB/ABK
6. TUPOKSI BAPPEDA LITBANG
7. LAKIP
8. LAPORAN TPP
9. PENGHARGAAN/SERTIFIKAT
10. SK KODE ETIK
11. APLIKASI SAPK
12. RENSTRA
13. PERJANJIAN KINERJA
14. SKP
15. PELATIHAN SIPD/PHOTO
16. PHOTO LARANGAN GRATIFIKASI
17. PAKTA INTEGRITAS
18. MAKLUMAT PELAYANAN
19. SK MAKLUMAT PELAYANAN
20. WEBSITE BAPPEDA LITBANG
21. SIMDA PERENCANAAN
22. LHKPN
23. SIPDA BAPPEDA LITBANG

FUNGSI KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIAT KABUPATEN SEHAT
2. SEKRETARIAT KONVERGENSI PENANGANAN STUNTING
3. SEKRETARIAT TJSLP/CSR
4. SEKRETARIAT TKPKD
5. SEKRETARIAT PAMSIMAS
6. SEKRETARIAT KLINIK INOVASI DAERAH
7. SEKRETARIAT POKJA PKP
8. SEKRETARIAT PENANGANAN GRK
9. SEKRETARIAT DAK KABUPATEN

REFORMASI BIROKRASI

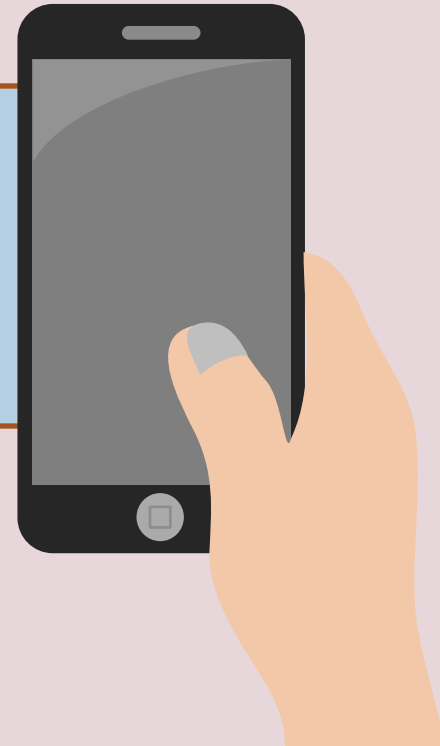
1. MANAJEMEN PERUBAHAN : - Pola Pikir
 - Budaya Kerja
 - Tata Kerja
2. DEREGULASI : - Kecukupan Per UU
 - Sinkronisasi Per UU
 - Kerangka Hukum
3. PELAYANAN PUBLIK : - Pelayanan Prima
 - SOP
4. PENGAWASAN : - Sistem Pengendalian/SPIP
5. AKUNTABILITAS : - Transparansi
 - Pertanggung Jawaban Keuangan
6. TATA LAKSANA : - Kelengkapan Dokumen :
RPJPN, RPJMN, RPJMD, RTRW, RKPD, RENSTRA, SOP,
JUKLAK, JUKNIS, DLL.
7. MANAJEMEN SDM : - Kompetensi SDM
8. KELEMBAGAAN : - Kelembagaan Yang Tepat Fungsi

REWARD/APRESIASI KINERJA

- TOP 100 PEMIMPIN PEMBAWA PERUBAHAN
Dari : 7sky Media dan Majalah IM Indonesia
- INSPIRING PROFESIONAL DAN LEADERSHIP 2021
Dari : Indonesia Award Magazine
- ASEAN INSPIRING AWARD WINNER 2021
Dari : Indonesia Award Magazine
- PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

MEDIA KOMUNIKASI BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id
2. Email : bappeda.bs@gmail.com
3. Instagram : [bappedakabbengkuluselatan](https://www.instagram.com/bappedakabbengkuluselatan)
4. Twitter : -
5. Facebook : BappedaLitbang BengkuluSelatan





POHON KINERJA SEKRETARIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SEKRETARIS : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sekretariat;
3. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
5. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi badan;
7. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan;
8. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksana di lingkungan badan;
9. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan;
10. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;

- 
11. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 12. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 13. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 14. Akoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 15. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

URUSAN : Penunjang



ESSELON II

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja

Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah

ESSELON III

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

Indikator

Nilai AKIP

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator

Nilai AKIP

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum dan kepegawaian

Indikator

Indeks Kepuasan ASN

Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan administrasi kepegawaian

Indikator

Indeks Kepuasan ASN

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Indikator

Persentase kepuasan Pelayanan ASN

Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN

Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja

Indikator

Persentase kepuasan Pelayanan ASN

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SASARAN

Meningkatnya lama pengoperasian aset daerah

Indikator

Persentase aset daerah kondisi optimal

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah

Indikator

Persentase tindak lanjut LHP BPK

Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya kualitas administrasi keuangan

Indikator

Persentase pemanfaatan e-planning dalam perencanaan

Indikator

Persentase BMD yang siap pakai

Kegiatan

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

SASARAN

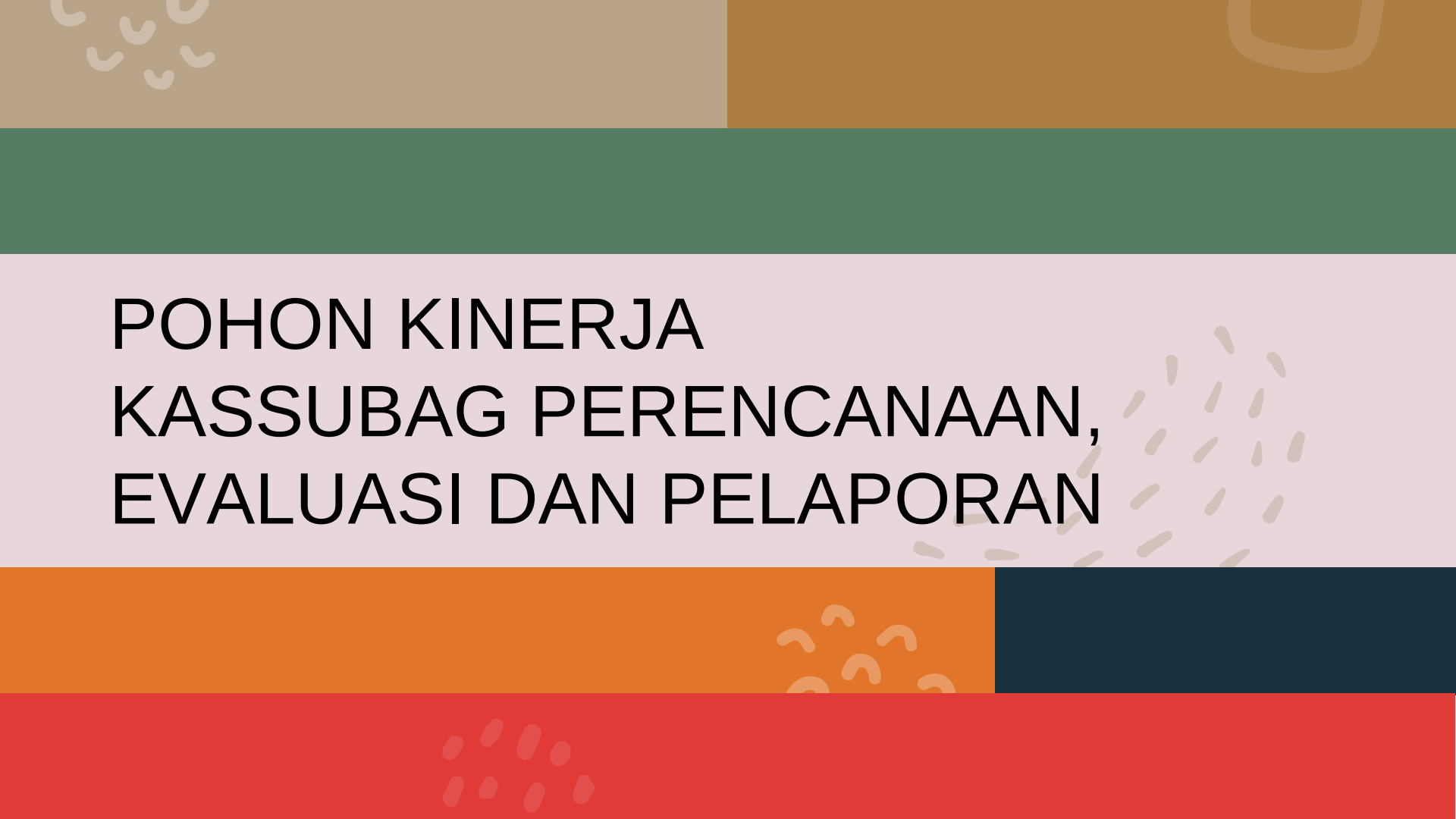
Meningkatnya ketertiban penatausahaan barang milik daerah

Indikator

Persentase BMD yang terkelola dengan baik

TARGET KINERJA SEKRETARIS OPD

NO	INDIKATOR	AWAL	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
I	IKU SEKRETARIAT						
	NILAI AKIP	80,00/A	80,00/A	85,00/A	90,00/A	90,00/A	90,00/A
	INDEKS KEPUASAN ASN	75	75	80	85	90	90
	PENGELOLAAN KEUANGAN						
	TGR	0	0	0	0	0	0
	ADMINISTRATIF	100%	100%	100%	100%	100%	100%



POHON KINERJA KASSUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN : Perbup No. 51 Tahun 2016

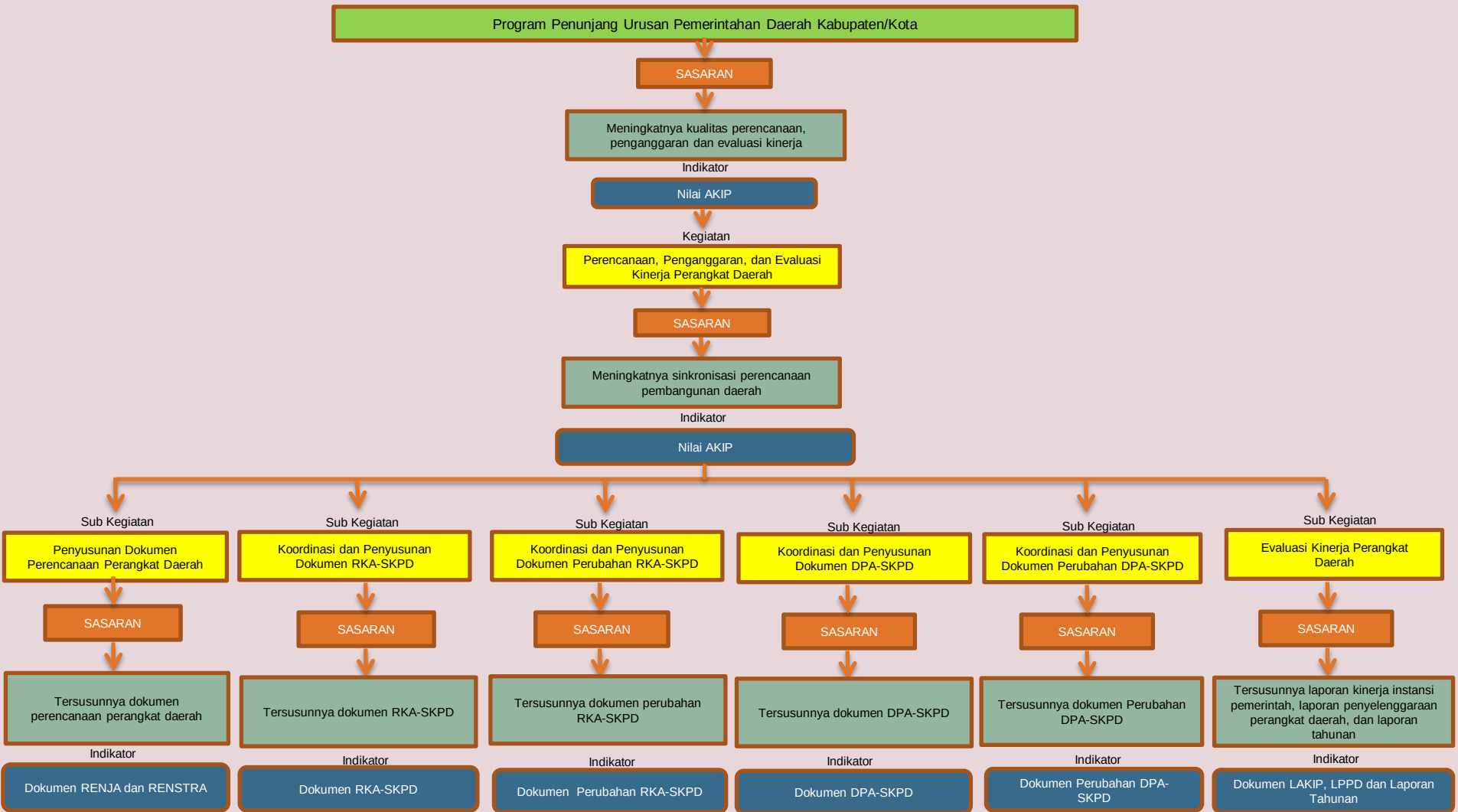
TUGAS :

Menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan

FUNGSI :

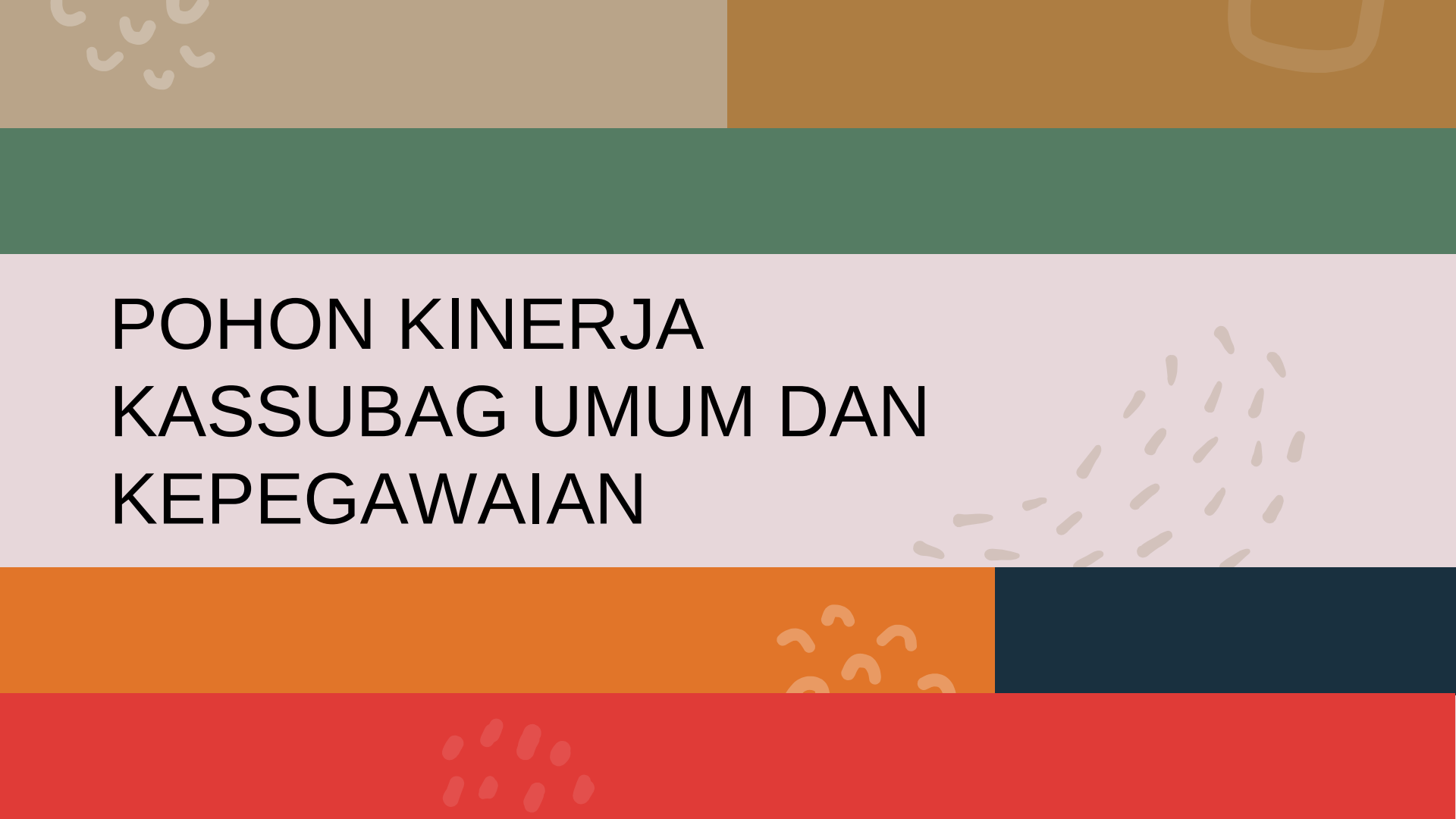
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan rencana kerja dan rencana strategis badan
3. Koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)
4. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran badan
5. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
8. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan badan secara berkala
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

URUSAN : Penunjang



EVIDENCE/BUKTI/DOKUMEN PERENCANAAN

1. RENJA
2. RENSTRA
3. RKA
4. DPA
5. LAPORAN TAHUNAN
6. LAKIP
7. LPPD
8. ROAD MAP RB



POHON KINERJA KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : Perbup No. 51 Tahun 2016

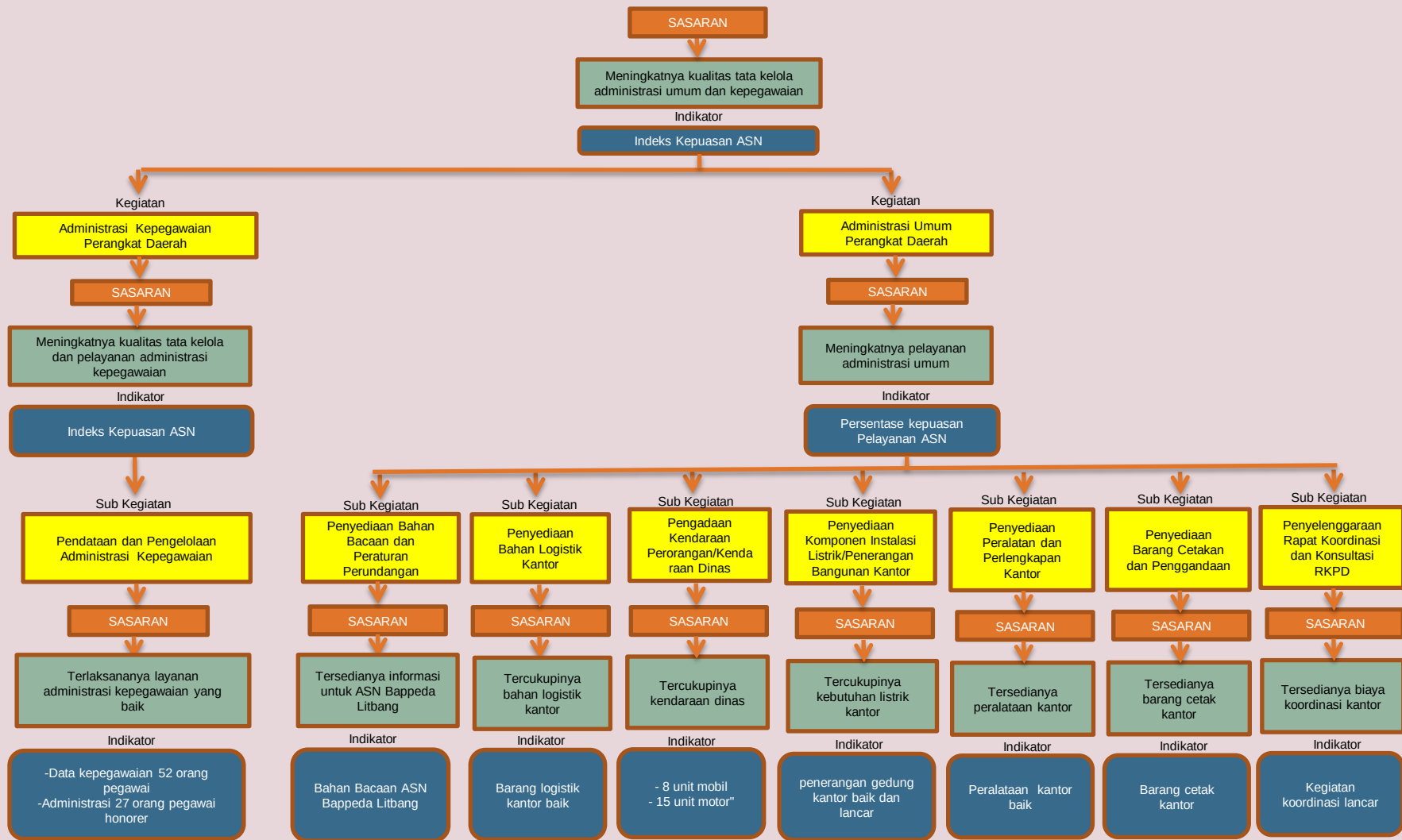
TUGAS :

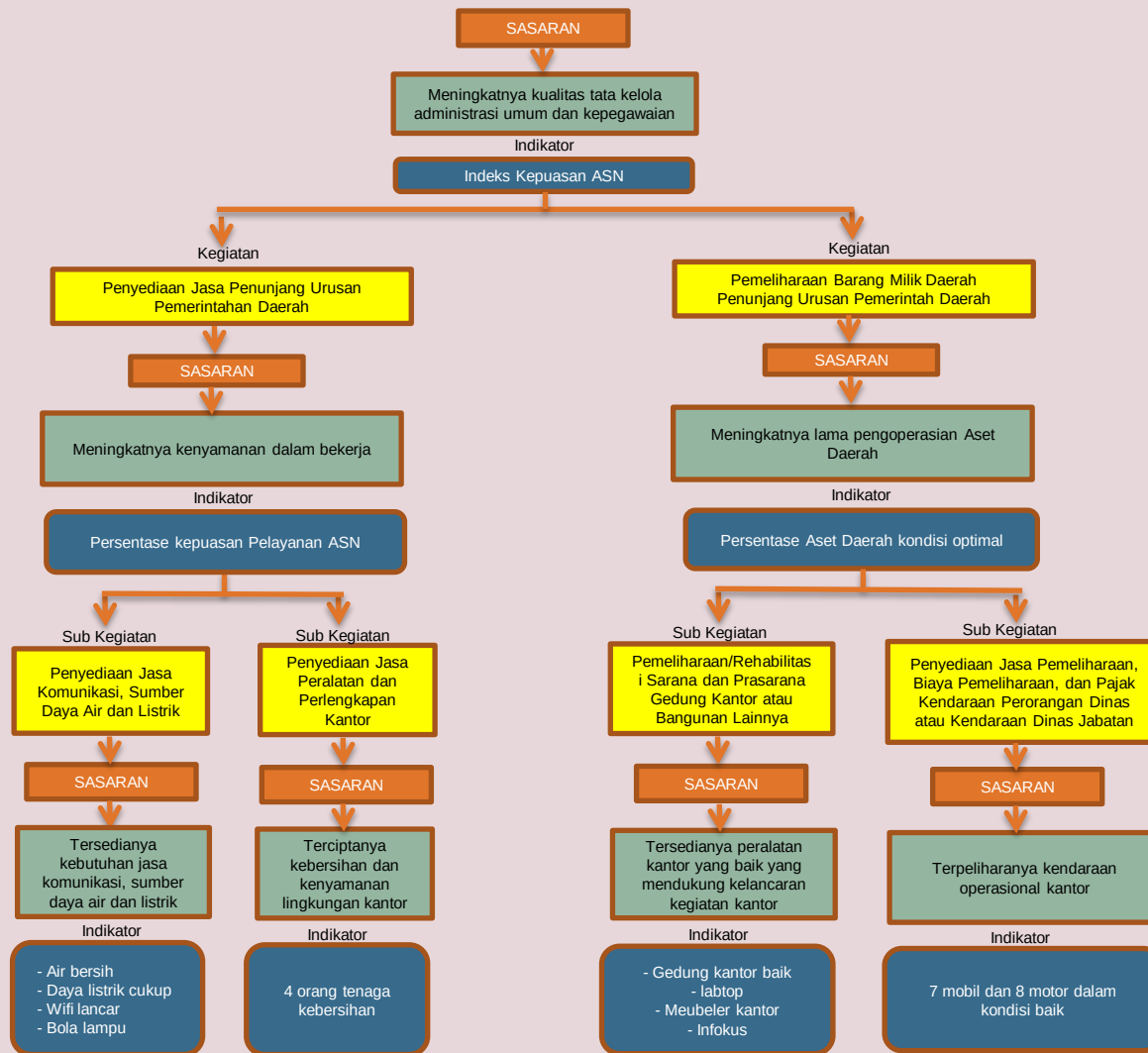
Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi
3. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian
4. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan badan
5. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
6. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
7. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Subbagian Umum dan Kepegawaian
8. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian
9. Penyiapan bahan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat
10. Pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

URUSAN : Penunjang





POHON KINERJA
KASSUBAG KEUANGAN DAN
BMD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KASUBAG KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH : Perbup No. 51 Tahun 2016

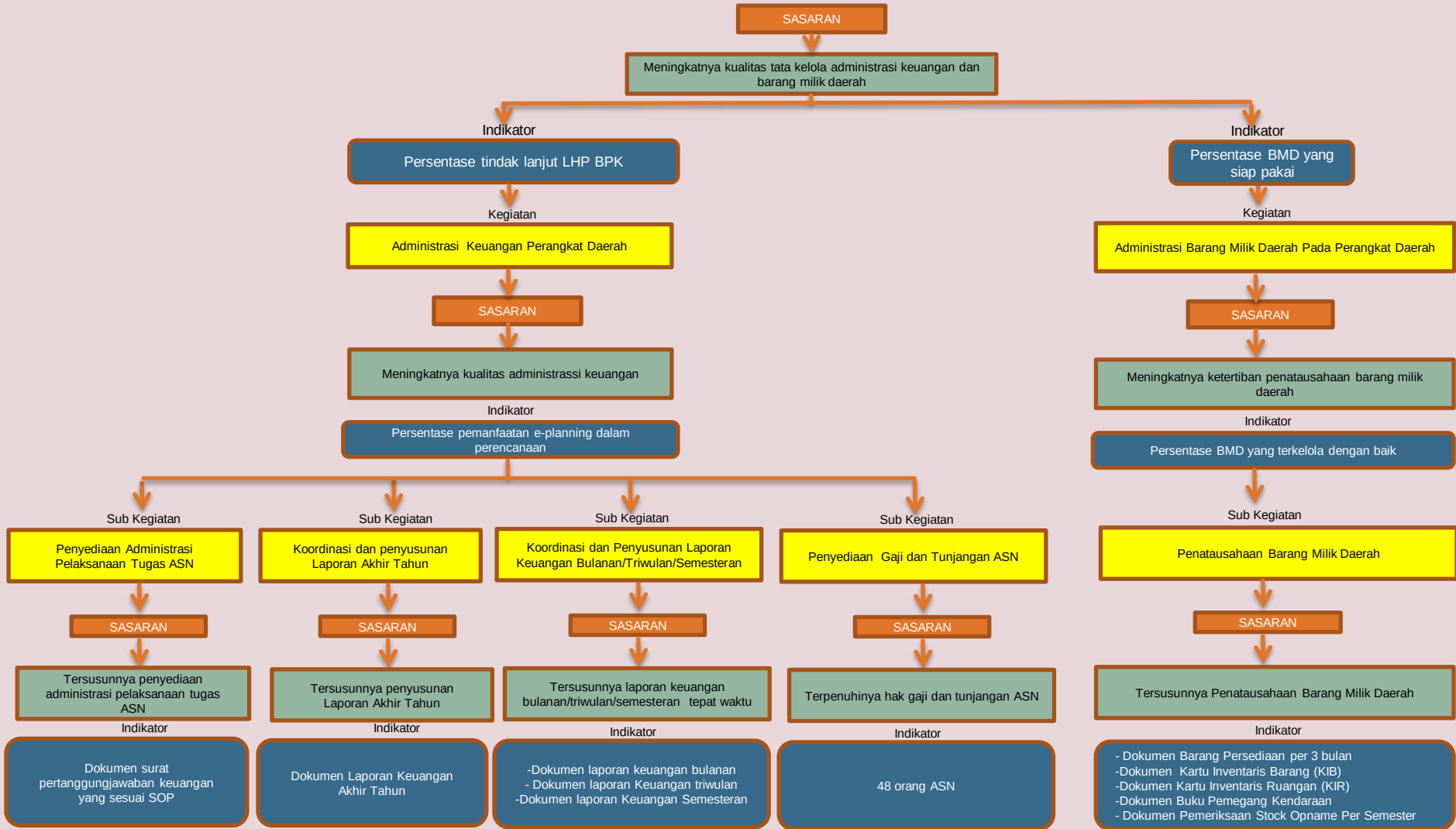
TUGAS :

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan badan
3. Pengelolaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
4. Penatausahaan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Penyusunan laporan fisik dan keuangan secara berkala
6. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan badan
7. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
9. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Urusan : Penunjang



CASCADING

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan oleh:

SUWITO, S.Sos.MM.

Kabid. P2EPD



TUGAS

melaksanakan analisa dan pengkajian, penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, sinkronisasi, pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



REFERENSI KERJA:

- UU Nomor 25 Tahun 2004
- UU Nomor 23 Tahun 2014
- PP Nomor 39 Tahun 2006
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

FUNGSI



CINTA BS

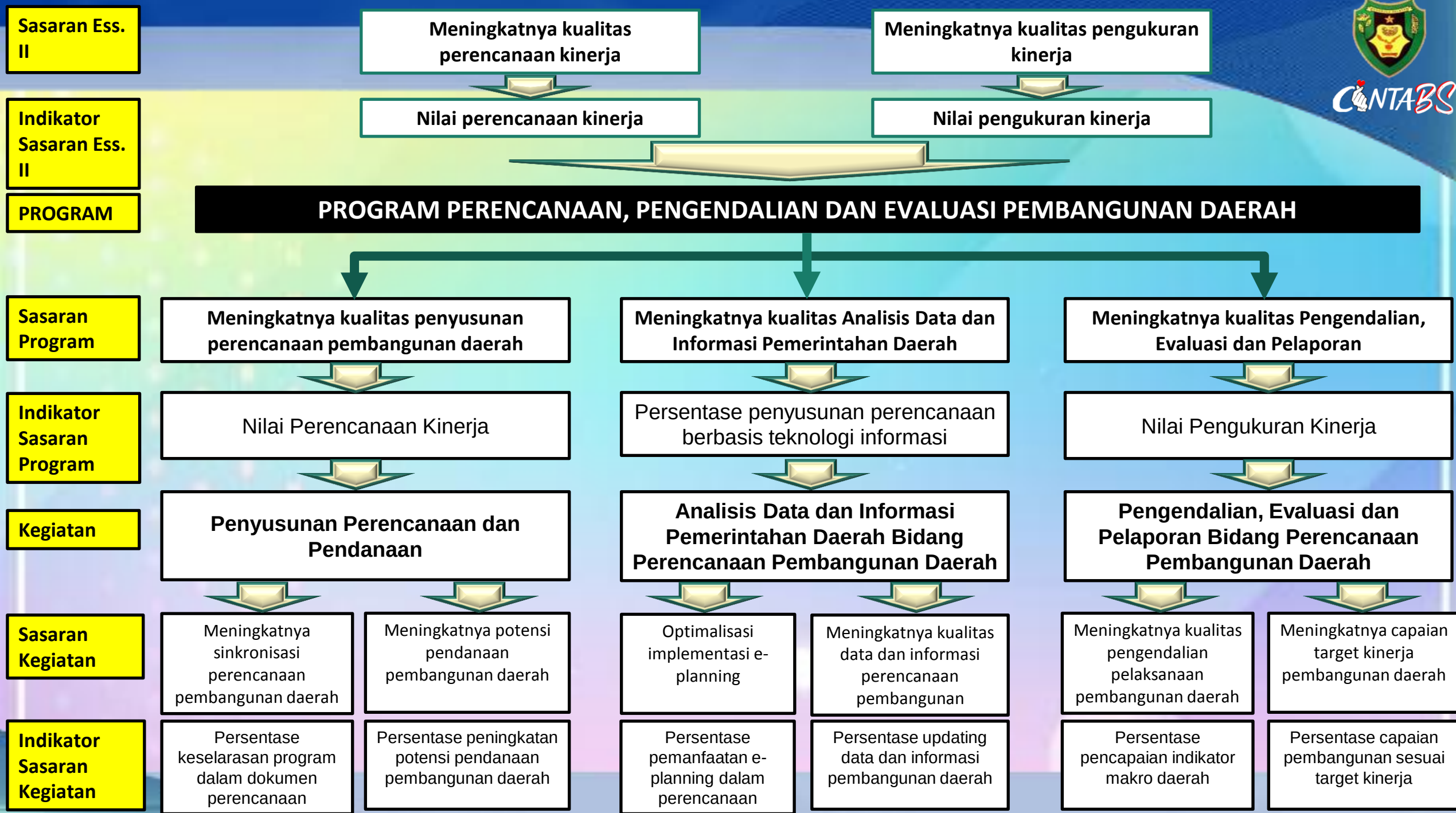
- 1) **Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;**
- 2) **Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;**
- 3) **Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;**
- 4) **Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;**
- 5) **Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;**
- 6) **Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;**
- 7) **Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;**
- 8) **Perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;**
- 9) **Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;**



FUNGSI



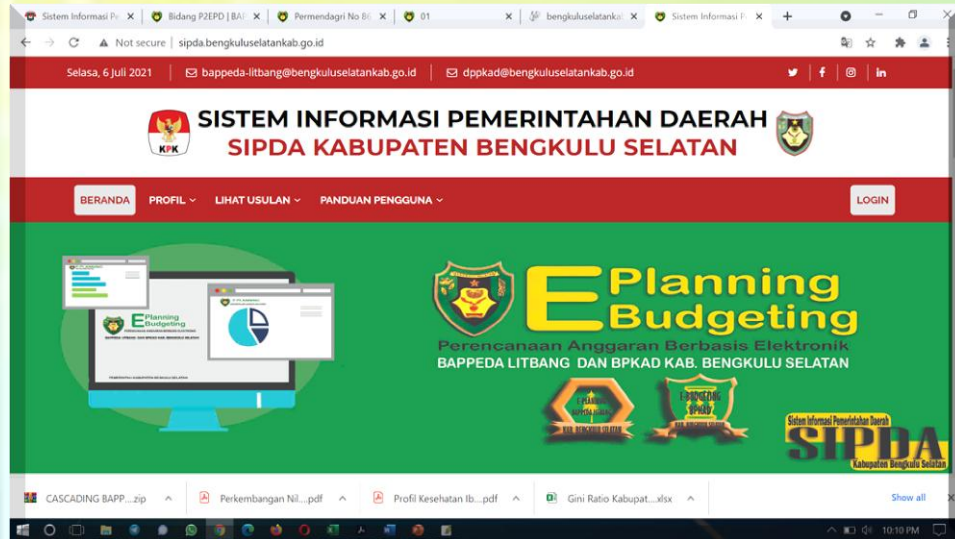
- 10) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 11) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 12) Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- 13) Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 14) Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 15) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan	Nilai Perencanaan Kinerja	Angka (Nilai)	20,29	23	25	30	30
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan	%	80	85	90	95	100
		Meningkatnya potensi pendanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan potensi pendanaan pembangunan daerah	%	10	10	15	20	25
		Meningkatnya kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi	%	85	90	100	100	100
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi implementasi e-planning	Persentase pemanfaatan e-planning dalam perencanaan	%	85	90	100	100	100
		Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah	%	75	75	80	90	100
		Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Pengukuran Kinerja	Angka (Nilai)	13,99	15	20	25	25
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian indikator makro daerah	%	80	85	90	95	100
		Meningkatnya capaian target kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja	%	80	85	90	95	100

INOVASI



Inovasi Sistem Informasi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian



Inovasi Survey Kualitas Pelayanan P2EPD



Inovasi Layanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat



Komitmen Pelayanan Prima



**KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



TERIMA KASIH

PERBUP



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (E-Planning);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan berbasis pada E-Planning;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning).

1967 tentang
bupaten Dalam
debaran Negara
bahan Lembaran
tentang Statistik
997 Nomor 39,
omor 3683;
tentang Sistem
negara Republik
debaran Negara
Informasi dan
Indonesia Tahun

SOP



CINTA3S

URAIAN PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubbid Evaluasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyiapkan bahan penyusunan Tim Monitoring dan evaluasi (Money)						DPA Kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	300 Menit	Rancangan SK Tim Monitoring dan Evaluasi
2.	Rapat Pembahasan persiapan pembentukan Money						- Rancangan SK Tim Money	60 Menit	- SK Tim Money

URAIAN PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR

No	Aktivitas	Kepala	Bidang	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
				Adminis trator	Tim e-planning		Kelengkapan	Waktu	Output		
					Tim I	Tim II				Tim III	
4.	I. Persiapan Pelaksanaan Aplikasi e-Planning										
5.	1. Rapat persiapan pelaksanaan penyusunan perencanaan dengan aplikasi e-planning										
6.	2. Memproses Surat Edaran Kepala Daerah tentang Rancangan Awal RKPD dan menyampaikan rekapitulasi hasil e-musrenbang kecamatan ke OPD										
7.	II. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah										
	1. Mengakses alamat website aplikasi e-planning										
	2. Masuk (login) sebagai user Perangkat Daerah										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BACK



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA – LITBANG)**

Jl. Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id - email: bappeda-litbang@bengkuluselatankab.go.id

Manna, 15 Juni 2021

Nomor : 050/151/B.2/Bappeda-Litbang/2021

Lampiran: 1 (Satu) berkas

Sifat : Penting

Perihal : Evaluasi Terhadap Tusi

Bidang P2EPD, Bappeda Litbang

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah
Ub. Kabag. Ortala
Kab. Bengkulu Selatan
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (e) angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016, bahwa Bappeda Litbang ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bappeda Litbang mempedomani Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun dalam pelaksanaan tugas masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tugas dengan bidang urusan yang diselenggarakan, terutama tugas pada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan (Paragraf 1, Pasal 12), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi (Paragraf 2, Pasal 13), serta Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Paragraf 3, Pasal 14), pada Bidang P2EPD Bappeda Litbang sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, dengan narasi usulan penyesuaian terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI

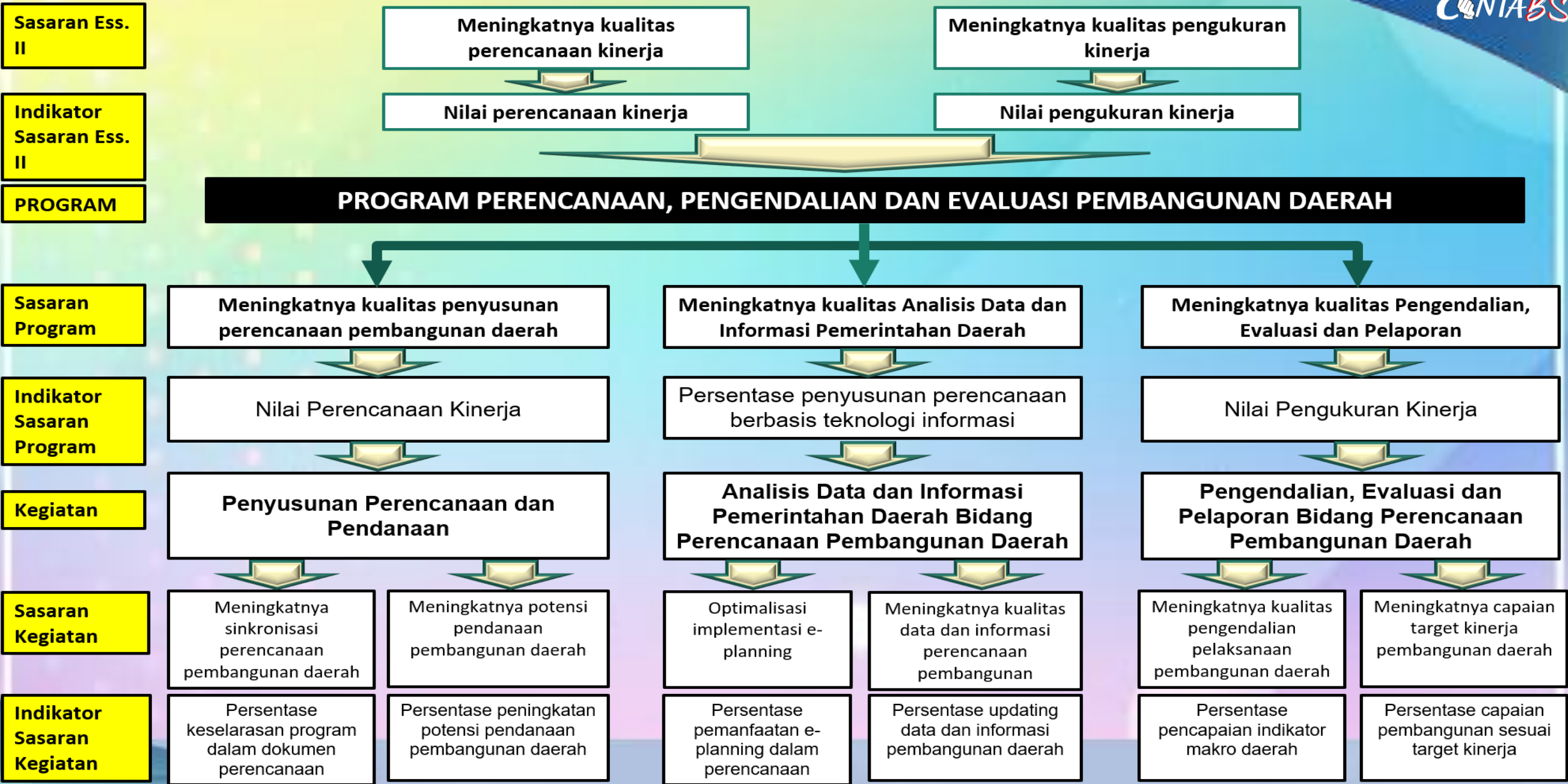


CINTA BCS

TEMUAN	USULAN
<u>Paragraf 1, Pasal 12</u> Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian, analisis, perumusan, pengkoordinasian, pembinaan serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, perumusan, pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah secara holistik integratif
<u>Paragraf 2, Pasal 13</u> Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengolahan, analisis, penyajian, pengkoordinasian, evaluasi dan pengamanan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah
<u>Paragraf 3, Pasal 14</u> Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan, pengkoordinasian, evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

BACK

POHON KINERJA KEPALA BIDANG P2EPD BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN



POHON KINERJA

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN PENDANAAN

Disampaikan oleh:

Mohd. Herdiansyah, ST.

Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan

mohadeade@gmail.com

TUGAS



Melaksanakan Penyusunan Bahan Pengkajian, Analisis, Perumusan, Pengkoordinasian, Pembinaan Serta Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah



FUNGSI



1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; (Penyusunan RKA dan DPA)
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
3. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan holistik integratif; (contoh :dalam Bentuk Ranwal RKPD/ Rancangan Teknokratik RPJMD)
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;



FUNGSI



7. **Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;**
8. **Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;**
9. **Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;**
10. **Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;**
11. **Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan prioritas pembangunan di daerah;**
12. **Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;**
13. **Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.**

KEGIATAN

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

SASARAN**KEGIATAN****SASARAN**

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Meningkatnya Potensi Pendanaan Pembangunan Daerah

Indikator

Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan

Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Persentase peningkatan potensi pendanaan pembangunan daerah sumber dana transfer daerah

SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

SASARAN**SASARAN****SASARAN**

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya Forum Musrenbang

Terlaksananya Pengusulan Program Pembangunan Dana Transfer (APBN)

Indikator

Indikator

Indikator

Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Pelaksanaan forum musrenbang

Rencana Kerja Pembangunan sumber dana transfer daerah



NO	TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022																																
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD																																
2.	Orientasi mengenai RKPD																																
3.	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD																																
4.	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan																																
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD																																
5.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD																																
6.	Penyampaian Surat Pokok Pikiran ke DPRD																																
7.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD																																
8.	Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD																																
9.	Penyampaian Rancangan Awal kepada Kepala Daerah																																
10.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah ke OPD																																
11.	Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD																																
12.	Musrenbang Desa/Kelurahan (Dikoordinir Kecamatan)																																
12.	Musrenbang RKPD di Kecamatan																																
C.	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD																																
13.	Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD																																
14.	Verifikasi dan Penyempurnaan Rancangan Renja OPD																																
15.	Forum OPD/Lintas OPD																																
16.	Penyampaian Rancangan RKPD kepada Bupati																																
16.	Musrenbang RKPD Kabupaten																																
D.	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD																																
17.	Penyempurnaan Rancangan RKPD																																
18.	Penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD																																
19.	Reviu APIP																																
20.	Fasilitasi rancangan Perkada ke Bappeda Provinsi																																
21.	Penetapan Perkada tentang RKPD																																



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



**KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

TERIMA KASIH

POHON KINERJA

KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI

Disampaikan oleh:

Antoni,S.IP

Kasubid Data dan Informasi

TUGAS

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengolahan, analisis, penyajian, pengkoordinasian, pengamanan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah



FUNGSI



1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang data dan informasi;(RKA,DPA)
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang data dan informasi; (SOP)
3. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah;
4. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
5. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
6. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
7. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
8. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
9. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.



KEGIATAN**Kegiatan**

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

Optimalisasi implementasi
e-planning

Meningkatnya kualitas data
dan informasi perencanaan
pembangunan

Indikator

Persentase pemanfaatan
e-planning dalam
penyusunan perencanaan

Indikator

Persentase updating data
dan informasi
pembangunan daerah

SUB KEGIATAN**Sub Kegiatan**

Pembinaan dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan
Pembangunan SKPD

SASARAN

Terlaksananya Pembinaan
dan pendampingan
pemanfaatan e-planning

Indikator

Aplikasi e-planning

Sub Kegiatan

Analisis Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

SASARAN

Terbangunnya
Pembangunan bank data
dan informasi
pembangunan daerah

Indikator

Aplikasi Satu Data

Sub Kegiatan

Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

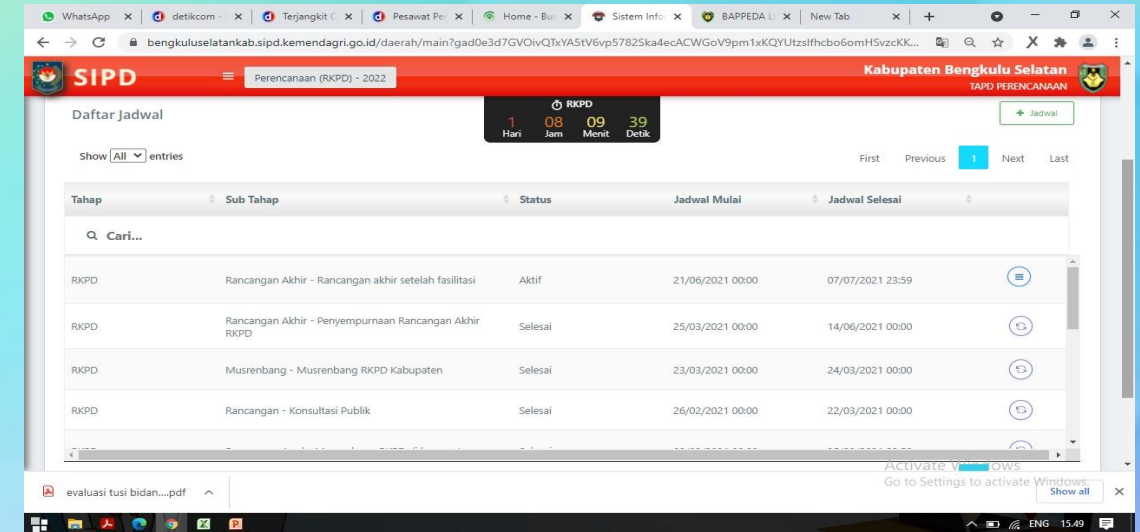
SASARAN

Terlaksananya Publikasi profil
pembangunan daerah

Indikator

Website dan Profil Daerah

Aplikasi sipd.kemendagri.go.id



Peraturan Bupati Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan

Perbup Satu Data Indonesia | BAI

(5) WhatsApp

Sistem Informasi Pemerintahan

Sistem Informasi Pemerintahan

← → ↻ ⚠ Not secure | bappeda.bengkuluselatankab.go.id/perbup-satu-data-indonesia/



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data, menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Kab. Bengkulu Selatan

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI MELANGGAR, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Pusat Pengembangan Inovasi Daerah

PELAYANAN PENGEKSPANSI INOVASI
082 12345 3557

KLINIK INOVASI

BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

AGENDA KEGIATAN BAPPEDA LITBANG

JULY, 2021

M	T	W	T	F	S	S
-	-	-	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



ENG 21.28

Aplikasi eplaning dan ebudgeting



← → ↻ ⚠ Not secure | sipda.bengkuluselatankab.go.id

Selasa, 6 Juli 2021 | ✉ bappeda-litbang@bengkuluselatankab.go.id | ✉ dppkad@bengkuluselatankab.go.id

🐦 | 📘 | 📷 | 🔗

 **SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**
SIPDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

BERANDA PROFIL ▾ LIHAT USULAN ▾ PANDUAN PENGGUNA ▾ [LOGIN](#)



 **EPlanning Budgeting**
Perencanaan Anggaran Berbasis Elektronik
BAPPEDA LITBANG DAN BPKAD KAB. BENGKULU SELATAN

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id



CINTA BSS



Foto Bimtek aplikasi sipd.kemendagri.go.id



CINTA BS



Screenshot SOP Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)

Jl. Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475
email : bappeda-litbang@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Activate
Go to Set



**KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



TERIMA KASIH

POHON KINERJA

KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Disampaikan oleh:

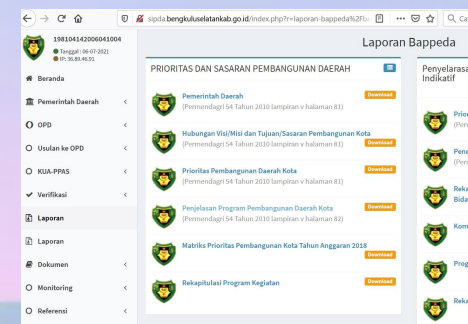
II SUHANTRI

KASUBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



TUGAS

Melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan, pengkoordinasian, evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah



1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah melalui pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
8. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
9. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

KEGIATAN

Kegiatan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah

Indikator

Persentase pencapaian indikator
makro daerah

Meningkatnya Capaian target
kinerja Daerah

Indikator

Persentase capaian
pembangunan sesuai target kinerja

Sub Kegiatan

Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di
Kabupaten Kota

SASARAN

Terlaksananya Koordinasi
pencapaian target indikator
makro daerah

Indikator

Laporan evaluasi target makro
daerah

Sub Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

Terlaksananya Optimalisasi
pencapaian target kinerja
pembangunan daerah

Indikator

Laporan triwulan

SUB KEGIATAN



CINTA BS



Beberapa aplikasi yang digunakan



198104142006041004
Tanggal : 06-07-2021
IP: 36.89.46.91

Beranda

Pemerintah Daerah

OPD

Usulan ke OPD

KUA-PPAS

Verifikasi

Laporan

Laporan

Dokumen

Monitoring

Referensi

Laporan Bappeda

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pemerintah Daerah**
(Permendagri 54 Tahun 2010 lampiran v halaman 81) [Download](#)
- Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota**
(Permendagri 54 Tahun 2010 lampiran v halaman 81) [Download](#)
- Prioritas Pembangunan Daerah Kota**
(Permendagri 54 Tahun 2010 lampiran v halaman 81) [Download](#)
- Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kota**
(Permendagri 54 Tahun 2010 lampiran v halaman 82) [Download](#)
- Matriks Prioritas Pembangunan Kota Tahun Anggaran 2018** [Download](#)
- Rekapitulasi Program Kegiatan** [Download](#)

Penyelarasan Re Indikatif

- Prioritas d
- Penetapan
- Rekapitula
- Kompilasi
- Program S
- Rekapitula

Usulan DAK - KRISNA | Laporan Bappeda | WhatsApp | Error 404 (Not Found)!!1 | E-Money - Bappenas

https://e-money.bappenas.go.id/le/

eMONEY

PP.39

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL) REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN :
Batas waktu masa verifikasi data laporan Triwulan I Tahun Anggaran 2021 adalah tanggal
15 Mei 2021

Direktorat SPPEPP | Klinik e-Money | Daftar K/L | Krisna

https://bengkuluselatankab.krisna.systems/dak/2020/dak-usulan

DAK 2020

Usulan DAK 1701 - Kab. Bengkulu Selatan 16 FINAL-RK

1.388 Usulan | Rp. 679.645,2 juta

Validasi Data DAK

MAX PAGU (RP) 170.377.760.000,0 SISA (APPROVED): RP. 597.509,9	TOTAL (RP) 170.377.162.490,1 APPROVED: RP. 170.377.162.490,1	FISIK (RP) 163.286.426.846,1 APPROVED: RP. 163.286.426.846,1	PENUNJANG (RP) 7.090.735.644,0 APPROVED: RP. 7.090.735.644,0
--	--	--	--

BIDANG

Search...

NO	KODE	NOMENKLATUR BIDANG	JENIS
1	01	Pendidikan	reguler penugasan afirmasi
2	02	Kesehatan	reguler penugasan afirmasi



**KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



TERIMA KASIH



POHON KINERJA
KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA

BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN 2021

RENDRA FEBRIANTO SS.,M.SI
KABID PPM



VISI MISI

“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS“



1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

2

Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3

Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi



**BAPPEDA LITBANG
BENGKULU SELATAN**

DASAR HUKUM



1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJMN Tahun 2005-2025
3. UU 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN
4. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6. PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. PP No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
10. PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

13. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Raperda, RPJPD, RPJMD dan Perubahannya
14. Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM
15. Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang SIPD
16. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. **Permendesa PDTT 13 tahun 2020** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa **Tahun 2021**
18. **Permendagri 53 Tahun 2020** tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
19. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Perda Provinsi Bengkulu No. 15 Tahun 2013 Tentang RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
21. Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025
22. Perda No. 8 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031
23. Perda No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

FUNGSI :

1. Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah tahuPembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. nan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD
4. Perumusan kebijakan, peyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang perencanaan dan litbang
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

URUSAN : Penunjang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA

TUGAS :

MELAKSANAKAN

1. **PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN**
2. **PENGKOORDINASIAN DAN PEMBINAAN SERTA**
3. **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN**
DI BIDANG PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah

Permendagri 86 tahun 2017

Siklus Manajemen Perencanaan Pemerintah



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FUNGSI :

1. PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
3. PENGKAJIAN, PENGKOORDINASIAN, DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
4. PENGKOORDINASIAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5. PEMBINAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SECARA HOLISTIK INTEGRATIF DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
6. PENGKOORDINASIAN DAN PENGENDALIAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
7. PENGKOORDINASIAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
8. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DARI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
9. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
10. PENGKOORDINASIAN, SINERGITAS DAN HARMONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
11. PENGEVALUASIAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
12. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA YANG DIBERIKAN ATASAN

URUSAN : Penunjang

Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya
Akuntabilitas Daerah

Indikator

Nilai SAKIP

Tujuan OPD 1

Meningkatnya kualitas perencanaan
dan pengukuran kinerja

Indikator

Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja

SASARAN

Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja

Indikator

Nilai perencanaan kinerja

Meningkatnya kualitas
pengukuran kinerja

Indikator

Nilai pengukuran kinerja

Indeks Daya Saing Daerah

SASARAN

Meningkatnya Daya Saing
Penyelenggaraan
Pemerintah

Indikator

Indeks Daya Saing Daerah

Tujuan OPD 2

Mewujudkan capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

Indeks inovasi daerah

SASARAN

Meningkatnya capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

Indeks inovasi daerah

Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja

Program kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

PROGRAM

OPTIMALISASI KINERJA PERENCANAAN pembangunan DAERAH

SASARAN

1. PERSENTASE KONSISTENSI RKPD DENGAN RPJMD DAN RENSTRA OPD
2. PERSENTASE KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN OPD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH PADA rpjmd

INDIKATOR

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

KEGIATAN

Meningkatnya/OPTIMALISASI kualitas perencanaan dan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia

SASARAN

1. PERSENTASE KONSISTENSI RKPD DENGAN RPJMD DAN RENSTRA OPD LINGKUP BIDANG PPM

2. PERSENTASE/JUMLAH KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN OPD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH PADA rpjmd BIDANG PPM

Jumlah/persentase Pemenuhan spm Urusan wajib Pelayanan dasar

Jumlah/persentase Pemenuhan Urusan wajib Non Pelayanan dasar

Jumlah/persentase Pemenuhan Urusan pilihan

Jumlah/persentase Pemenuhan Urusan PENUNJANG

K

A

B

I

D

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

PILIHAN

PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum & penataan ruang
4. Perumahan rakyat & kawasan pemukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial

NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanian;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan & pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan

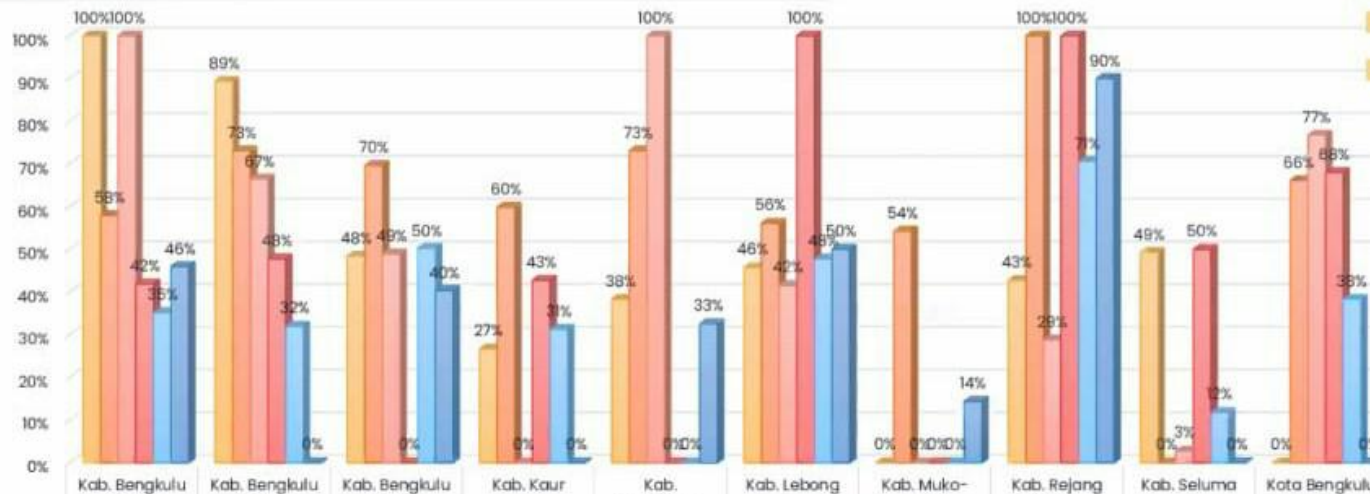
PENUNJANG

1. Kelautan Dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi & Sumberdaya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

1. Perencanaan

2. Keuangan
3. Kepegawaian serta Diklat
4. Penelitian dan pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan PUUan.

CAPAIAN SPM KAB/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU SELURUH BIDANG 2020



Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

SPM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR pada Bidang PPM

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- M. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

TARGET KINERJA BIDANG PPM

NO	INDIKATOR	AWAL	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
I	KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN (RKPD DENGAN RENJA ,RENSTRA, RPJMD) PERANGKAT DAERAH LINGKUP BIDANG PPM	99	100	100	100	100	100
II	KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN OPD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH DALAM RPJMD	63,5	100	100	100	100	100
III	CAPAIAN URUSAN WAJIB SPM PELAYANAN DASAR (SPM)						
	PENDIDIKAN	100	100	100	100	100	100
	KESEHATAN	58	100	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM	100	100	100	100	100	100
	PERUMAHAN PEMUKIMAN	42	100	100	100	100	100
	TRANTIBUM	35	100	100	100	100	100
	SOSIAL	46	100	100	100	100	100

FUNGSI KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIAT KABUPATEN SEHAT
2. SEKRETARIAT KONVERGENSI PENANGANAN STUNTING
3. SEKRETARIAT TJSLP/CSR
4. SEKRETARIAT TKPKD
5. SEKRETARIAT PAMSIMAS

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. KONSISTENSI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIDAK TERDISTRIBUSI KE LEVEL TERENDAH (DESA)
2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HANYA FOKUS PADA PERENCANAAN DI TINGKAT KABUPATEN SAJA.(MENGABAIKAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI/PUSAT)
3. KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA (BERLEBIH SECARA KUANTITAS KURANG SECARA KUALITAS)
4. EGO SEKTORAL (ADA PROGRAM YANG PERLU SENTUHAN BANYAK OPD)
5. PROGRAM PUSAT YANG OVER LAP YANG TIDAK BERKOORDINASI DENGAN OPD TEKNIS YANG MENANGANI
6. OUTPUT ORIENTED



POHON KINERJA
KEPALA SUBBIDANG
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA II

BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN 2021

SRI HERLINA UJI CHRISTYORINI, SH, M.Si
KASUBBID PPM II



VISI MISI

“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS“



1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

2

Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3

Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi



**BAPPEDA LITBANG
BENGKULU SELATAN**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA II

TUGAS :

MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN PENGKOORDINASIAN DAN PEMBINAAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FUNGSI :

1. PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN TUGAS DI SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA II,
2. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA II,
3. PENGKAJIAN, PENGKOORDINASIAN, DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
4. PENGKOORDINASIAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
5. PEMBINAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SECARA HOLISTIK INTEGRATIF DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
6. PENGKOORDINASIAN DAN PENGENDALIAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
7. PENGKOORDINASIAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
8. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DARI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
9. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
10. PENGKOORDINASIAN, SINERGITAS DAN HARMONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,
11. PENGEVALUASIAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
12. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA YANG DIBERIKAN ATASAN

URUSAN : Penunjang

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Sasaran

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia.

Indikator

Persentase Konsistensi RKPD dengan RPJMD dan Renstra
OPD Lingkup Bidang PPM

Sub Kegiatan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sasaran

Terlaksananya Sinkronisasi
Dokumen Perencanaan

Indikator

1 (Satu) Laporan

Persentase/ jumlah kesesuaian prioritas pembangunan OPD
dengan Visi Misi Kepala Daerah pada RPJMD

Sub Kegiatan

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sasaran

Tersusunnya
Pelaporan RAD HAM

Indikator

Pelaporan RAD HAM
(3 kali dalam satu tahun)

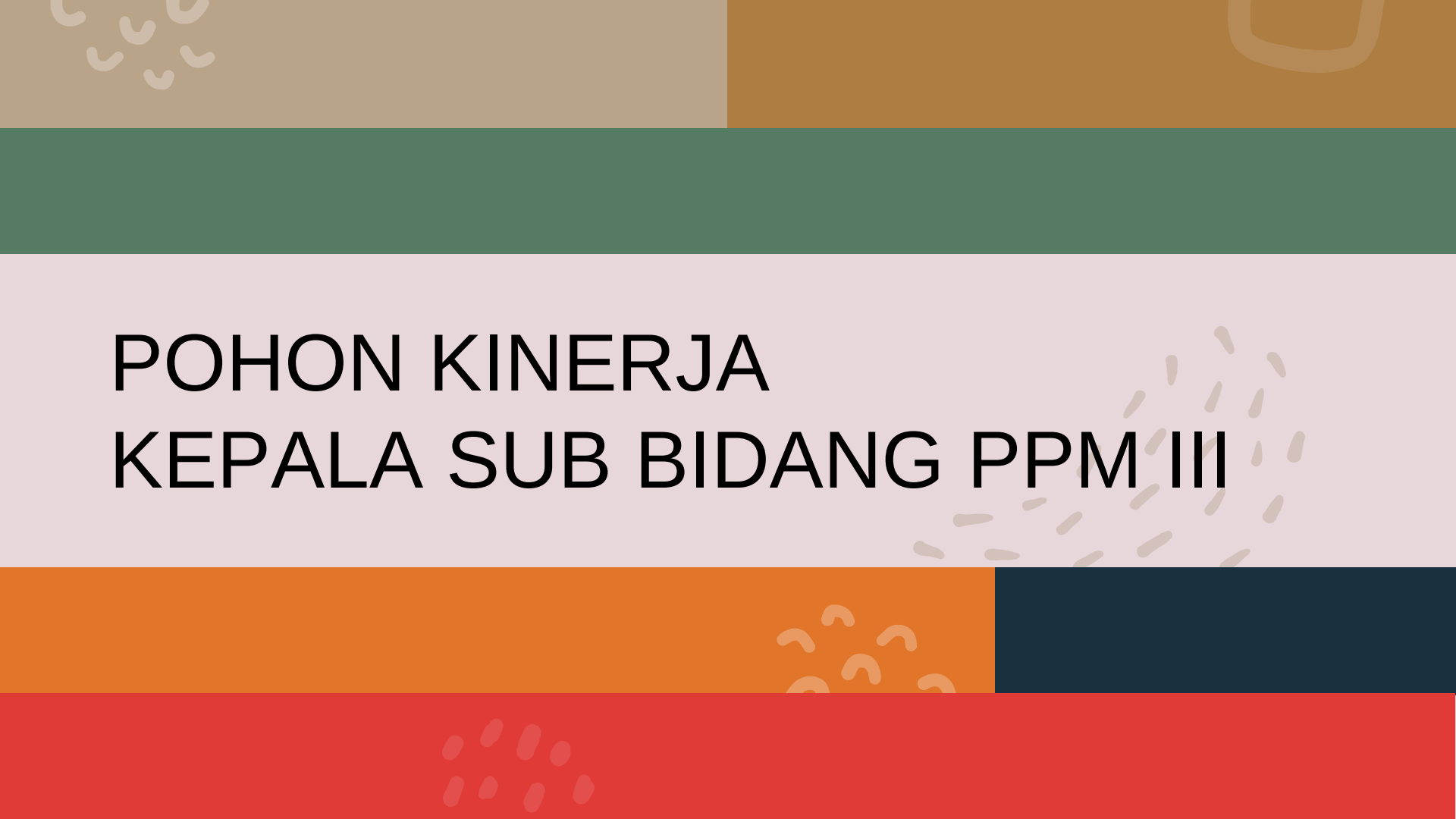
Sasaran

Tersusunnya Dokumen Pemantauan
Capaian Pembangunan Berkelanjutan

Indikator

1 (Satu) Dokumen



The background features a series of horizontal bands in muted colors: light beige, olive green, light pink, orange, dark blue, and red. Abstract shapes, including small white and orange curved lines and larger orange and red dotted patterns, are scattered across the bands.

POHON KINERJA KEPALA SUB BIDANG PPM III

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

VISI

Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan (Emas) Elok maju aman sejahtera Berlandaskan (Cinta-BS) Cerdas integritas inopatif tauladan agamis –Berdaya Saing.

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KEPALA SUB BIDANG PPM III : Perbup No. 09 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang social, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang PPM III
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang PPM III
3. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Sosial,Komunikasi dan Informatika, ketenteraman dan ketertiban umum,perlindungan masyarakat,administrasi kependudukan,dan pencatatan sipil,persandian dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang, sosial, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.



6. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Pemantauan dan Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , persandian dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia III. dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan



Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

SASARAN

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di bidang pemerintahan pembangunan manusia

Indikator

Persentase Perencanaan Ruang Lingkup Mitra Bidang PPM

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sasaran

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Indikator

Dokumen LP2KD

Indikator

Persentase kesesuaian Prioritas Pembangunan OPD dengan Visi Misi Kepala Daerah Pada RPJMD

Sub Kegiatan

Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

sasaran

Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang .

Indikator

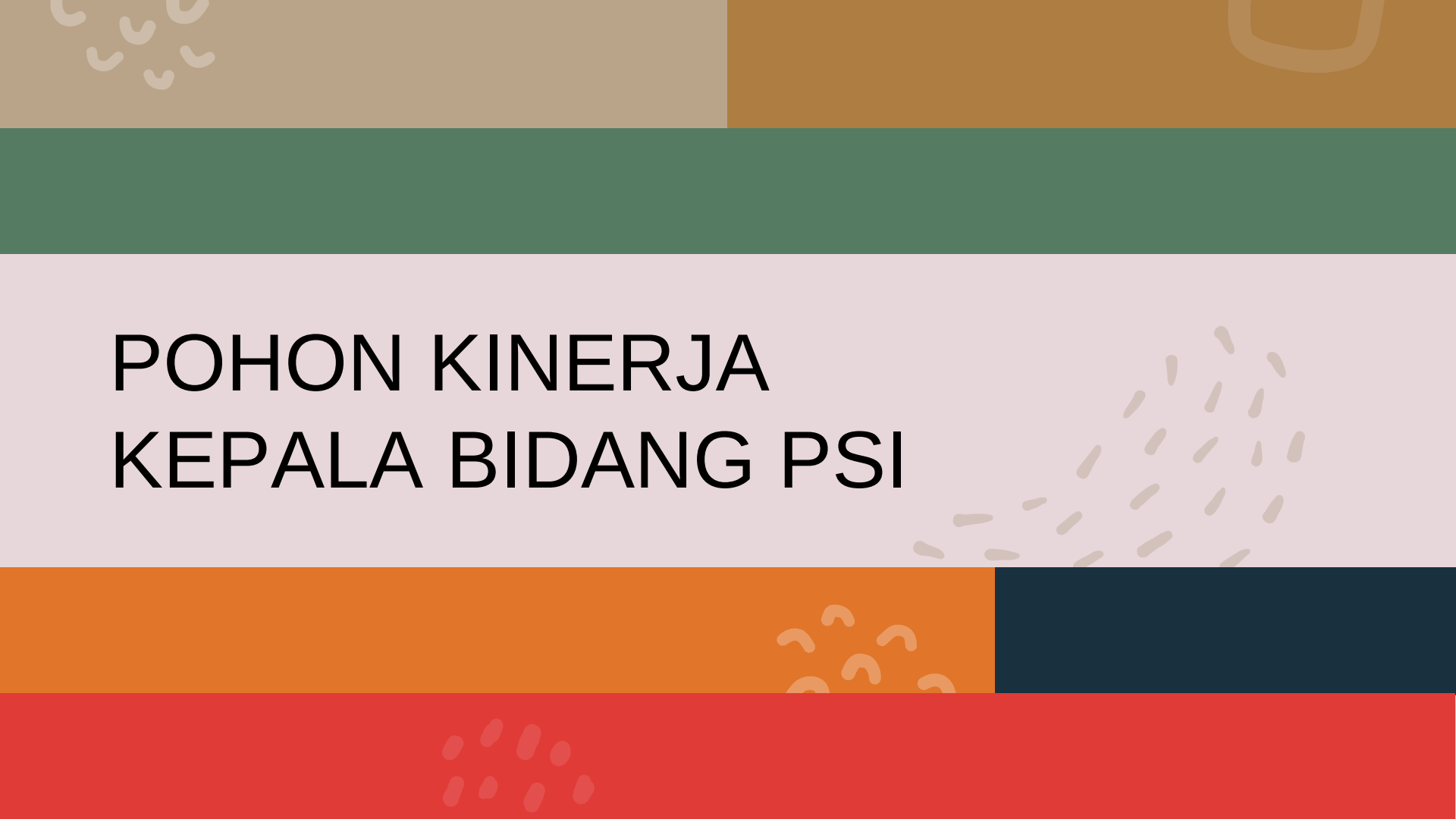
Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

sasaran

Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dengan cara Asistensi

Indikator

Laporan Finalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



POHON KINERJA KEPALA BIDANG PSI

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan Perencanaan secara umum
 - ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - ✓ Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - ✓ Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang PSI
 - ✓ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - ✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 - ✓ PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
 - ✓ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - ✓ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang PSI
 - ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 28/2018 Tentang Kerja Sama Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 22/2020 Tentang Penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 21/2020 Tentang Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang
 - ✓ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 - ✓ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
 - ✓ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi
 - ✓ Perpres NO 61 /2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
 - ✓ Peraturan Menteri LHK Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KEPALA BIDANG (PSI) : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan **penyusunan** bahan perumusan, **pengkoordinasian dan pembinaan** serta **evaluasi** pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

FUNGSI :

1. **penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;**
2. **penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;**
3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
8. **pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;**
9. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;**
10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
11. **pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan**
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

URUSAN : Penunjang

MISI 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya
Akuntabilitas Daerah

Indikator

Nilai SAKIP

Tujuan OPD 1

Meningkatnya kualitas perencanaan
dan pengukuran kinerja

Indikator

Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja

SASARAN

Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja

Indikator

Nilai perencanaan kinerja

Meningkatnya kualitas
pengukuran kinerja

Indikator

Nilai pengukuran kinerja

Indeks Daya Saing Daerah

SASARAN

Meningkatnya Daya Saing
Penyelenggaraan
Pemerintah

Indikator

Indeks Daya Saing Daerah

Tujuan OPD 2

Mewujudkan capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

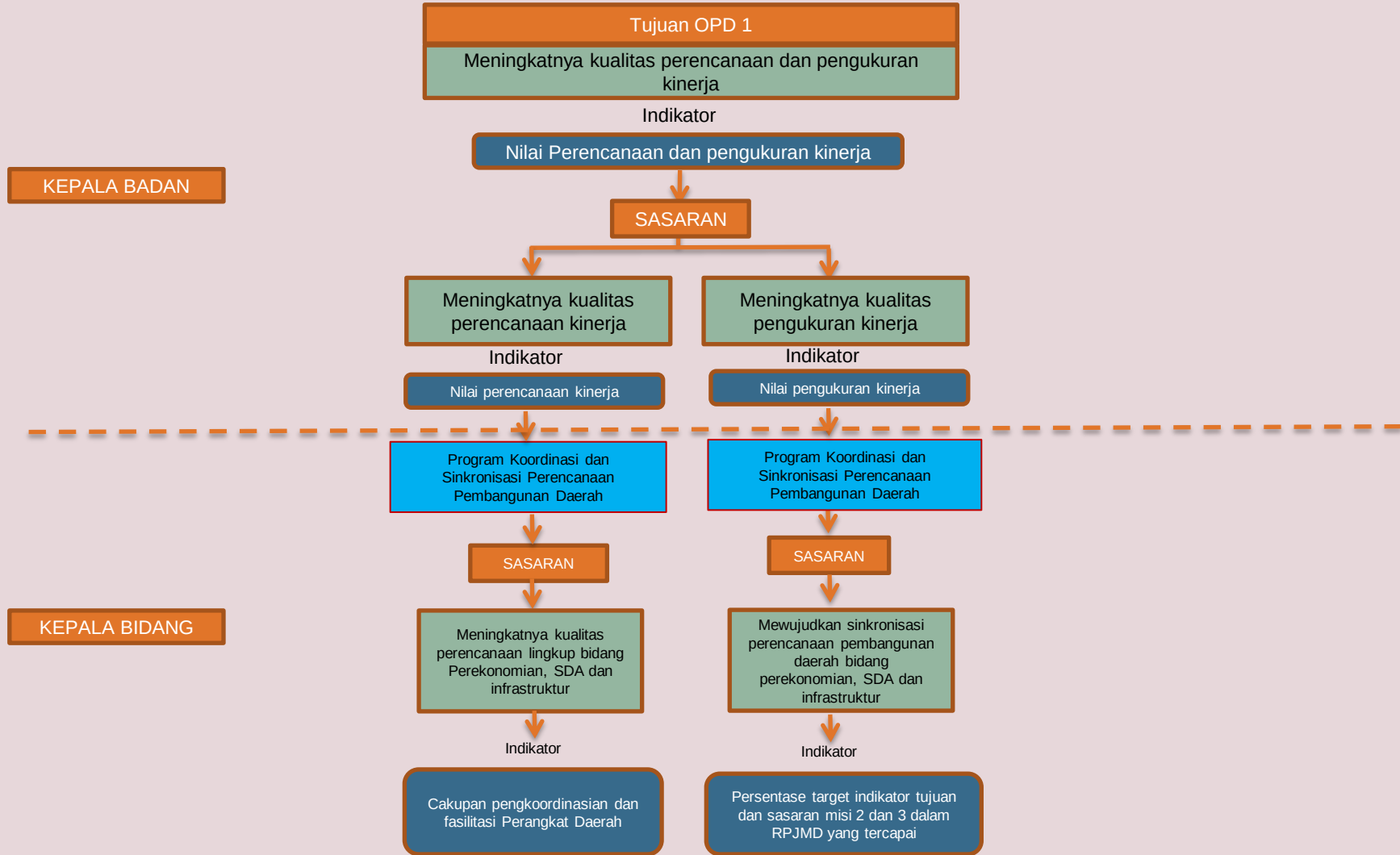
Indeks inovasi daerah

SASARAN

Meningkatnya capaian kapasitas
inovasi daerah

Indikator

Indeks inovasi daerah



Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang Perekonomian, SDA dan infrastruktur

Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, SDA dan infrastruktur

Indikator

Indikator

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah

Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Wilayah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Wilayah

SASARAN

SASARAN

SASARAN

SASARAN

Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam bidang Perekonomian dan SDA

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen teknis

Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam bidang Infrastruktur Dan Wilayah

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen teknis

Meningkatnya capaian target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD

Meningkatnya capaian target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dalam RPJMD

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi

Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan

Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi

Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan

Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai

Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dalam RPJMD yang tercapai

Target Indikator Kinerja

TUJUAN/ SASARAN	KODE PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTCOME), SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TUJUAN :Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja					Nilai perencanaan dan pengukuran kinerja	%		34,28	40,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
SASARAN :Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja					Nilai perencanaan kinerja	%		20,29	25,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah	%			90	90	90	90	90	90
	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi	%				100	100	100	100	100	100
				Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan	%				100	100	100	100	100	100
	5.01.03.2.02.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.02.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen teknis	Dokumen				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi	%				100	100	100	100	100	100
				Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan	%				100	100	100	100	100	100
	5.01.03.2.03.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.03.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen teknis	Dokumen				1	1	1	1	1	1

Target Indikator Kinerja

TUJUAN/ SASARAN	KODE PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTCOME), SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
SASARAN :Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja				Nilai pengukuran kinerja	%		13,99	15,00	17,00	20	20	20	20
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90
	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1	
	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90
	5.01.03.2.03.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1

Inovasi

- INOVASI TAHUN 2020

Sistem Pengarsipan Yang Mengadopsi Gramedia

- Latar belakang : Dokumen/Laporan di bidang PSI lebih dari 1000 pcs, sulit untuk mencari dokumen tersebut secara manual
- Seluruh dokumen/laporan di indentifikasi dan klasifikasikan berdasarkan sub bidang, selanjutnya diinput kedalam excel dengan di beri kode, termasuk penempatan dokumen (lemari, rak, dan dokumen diberi tempelan sesuai dengan inputan yang dilakukan.
- Aplikasinya, ketika mencari dokumen/laporan semuanya dengan mudah tinggal cek di laptop dokumen yang dimaksud lihat kode yang tertera cari di lemari yang sudah di beri kode.
- Guna mendukung pelaksanaan Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan idikator sasaran kepala OPD yaitu Nilai perencanaan kinerja

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur					
Sub Bidang Infrastruktur					
Dinas PUPR					
No	Kode	Uraian	Tahun Anggaran	Bidang	Keterangan
1	C.1.1	RKA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
2	C.1.2	RKA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
3	C.1.3	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
4	C.1.4	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
5	C.1.5	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
6	C.1.6	RKA SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
7	C.1.7	RKAP SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
8	C.1.8	DPPA SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
9	C.1.9	DPPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
10	C.1.10	RKAP SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	



Inovasi

- INOVASI TAHUN 2021

Sistem informasi Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan (Siinforman)

- Aplikasi ini dikembangkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Bidang PSI Bersama dengan mitra kerja (Tenaga Ahli / Programmer) guna mendukung pelaksanaan Program PATEN pada MISI III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator sasaran kepala daerah yaitu Persentase kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
- Aplikasi ini dirancang untuk mengolah data secara continue terkait dengan populasi dan transaksi ternak yang datanya dapat dilihat secara online oleh masyarakat luas dengan mengakses website [Http://siinforman.bengkuluselatankab.go.id](http://siinforman.bengkuluselatankab.go.id). Atau dapat di download melalui playstore " siinforman"
- Menu yang ada di dalam aplikasi sisinforman; 1) Data peternak, 2) Data ternak, 3) Kasus penyakit, 4) Kelahiran Dan kematian, 5) Jual/ Beli ternak.
- Aplikasi ini dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan bemitra dengan pemilik ternak, dinas pertanian bidang ternak dan bidang penyuluh.
- Rencana kedepan menghadapi idul adha (hari raya korban), menyiapkan selebaran untuk peternak dan masjid, untuk mempromosikan jual beli ternak melalui aplikasi siinforman.



Inovasi

- KONSEP INOVASI YANG DIKEMBANGKAN TAHUN 2022

OPD AWARD (PENGHARGAAN OPD TERHADAP PERENCANAAN YANG BAIK)

- Bentuk Tim (Sk), Rapat Perumusan Juklak Dan Juknis
Tim ; Seluruh Bidang Bappeda Dan Opd Lain Menyesuaikan

- Penilaian : Perencanaan 60 %, Inovasi 40 %

PERENCANAAN 60 %

Kriteria :

- ✓ Renstra Terhadap RPJMD (Keselarasan) Sasaran, Sasaran Indikator, Program Dan Kegiatan (30)
- ✓ Renja Terhadap RKPD RPJMD (Keselarasan) Sasaran, Sasaran Indikator, Program Dan Kegiatan (30)
- ✓ Keselarasan Renja Dengan RKPD, KUA PPAS Dengan DPA (25)
- ✓ Sistematika Penulisan 9 (15)

Nilai Full(4 Kriteria) $100 \times 60 \% = 60$

INOVASI 40 %

Kriteria

- ✓ Sesuai Perbup I Bidang I Inovasi (40)
- ✓ Kelengkapan Dokumen Pendukung (30)
- ✓ Pelaksanaan Jalan/Tidak (30)

Nilai Full(3 Kriteria) $100 \times 40 \% = 40$

Kategori : OPD Nilai 0-50 (Kurang), >51-75 (Sedang), >76 Baik

3 Terbaik Mendapatkan Piala Dan Penghargaan Serta Uang

TUJUANNYA ADALAH

1. Mengapresiasi Kinerja OPD
2. Mewujudkan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dengan Indikator Sasaran Kepala Daerah Nilai Sakip
3. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Terbaik
4. Memacu Kinerja OPD Yang Mendapatkan Nilai Kurang Dan Sedang
5. Secara khusus untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tujuan dan sasaran daerah dengan tujuan dan sasaran opd , dengan kata lain sebagai alat ukur untuk mencapai indikator pada program di bidang PSI

Inovasi

- KONSEP INOVASI YANG DIKEMBANGKAN TAHUN 2022

Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional (BS-Lahat-Pagar Alam)

Latar Belakang : Salah satu visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya adalah transformasi ekonomi. Visi Presiden ini kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu arah kebijakan dari RPJMN 2020-2024 khususnya pada ruang lingkup desentralisasi dan otonomi daerah adalah **"meningkatkan kualitas kelola pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah"**. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tiga strategi, salah satunya **adalah pengembangan kerjasama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru**, kemudian di tuangkan kedalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -2026 terhadap **Pengembangan Ekonomi Regional**.

MEMAKSIMALKAN POTENSI YANG ADA DI BENGKULU SELATAN UNTUK DITAWARKAN KE LAHAT DAN PAGAR ALAM SEHINGGA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MULTIFIER EFFECT

PENGEMBANGAN APLIKASI KERJASAMA DAERAH SEPERTI JABAR

<https://investasi.jabarprov.go.id/>



SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DAERAH BERBASIS WEBSITE

untuk memudahkan pengelola Kerja Sama Daerah dan Mitra melacak progress Kerja Sama Daerah

1. Database Kerja Sama Daerah;
2. Pengajuan Kerja Sama;
3. Informasi Progress Fasilitas Naskah Kerja Sama;
4. Informasi Implementasi dan Evaluasi Kerja Sama Daerah.

**TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN
(PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI REGIONAL
BENGKULU SELATAN-LAHAT-PAGAR ALAM)**

PERSIAPAN

1. Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
2. Identifikasi Dan Pemetaan Urusan Pemerintahan (Berita Acara Dan SK Program Dan Kegiatan Yang Akan Dikerjasamakan)
3. Kerangka Acuan Kerja Berkaitan Dengan Bidang KSDD (Bahan Presentasi Potensi Yang Akan Dikerjasamakan)
4. TTKSD Melakukan Pengkajian /Telaah Kerangka Acuan Kerja Berkaitan Dengan Bidang KSDD

PENAWARAN

1. TTKSD Menyiapkan Surat Penawaran Rencana KSDD Dilengkapi KAK
2. Surat Penawaran Rencana KSDD Ditandatangani Kepala Daerah Disampaikan Ke Kepala Daerah Calon Mitra KSDD Dilengkapi KAK
3. Apabila Dalam Waktu 30 Hari Tidak Ada Tanggapan, Dilakukan Penyampaian Surat Penawaran Kedua Selama 15 Hari, Dan Apabila Tidak Ada Tanggapan , Bupati Pemakarsa Melaporkan Kepada Gubernur Calon Mitra KSDD

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)

1. Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD Disampaikan Kepada TTKSD Untuk Dibahas
2. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama KSDD Paling Lama 5 Tahun

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)

1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDD Oleh Kepala Daerah Pemrakarsa Dan Kepala Daerah Mitra

PERSETUJUAN DPRD

1. Kepala Daerah Menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan DPRD Dilengkapi Kesepakatan Bersama KSDD Dan Rancangan PKS
2. Pimpinan DPRD Menyampaikan Surat Kepada Kepala Daerah Disertai Kajian Rancangan PKS
3. Kepala Daerah Menindaklanjuti Surat Pimpinan DPRD Atas Hasil Kajian Rancangan PKS Dan Menyampaikan Kembali Surat Permohonan Persetujuan DPRD

PENYUSUNAN PKS

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan PKS KSDD Disampaikan Ke TTKSD Dan Dibahas

PENANDATANGANAN PKS

1. Penandatanganan PKS KSDD Oleh Kepala Daerah Pemrakarsa Dengan Kepala Daerah Mitra KSDD

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Dilakukan Oleh Para Pihak Sesuai Subtansi Yang Terdapat Dalam PKS KSDD

PENATAUSAHAAN

1. Penatausahaan Dilakukan Oleh TTKSD Melalui Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan Dan Penandatanganan Dokumen KSDD

PELAPORAN

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa Menyampaikan Kepada Bupati Mengenai Pelaporan KSDD Setiap Satu Semester



POHON KINERJA KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN



Dasar Hukum

- Berkenaan dengan Perencanaan secara umum
 - ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - ✓ Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan
- Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang PSI
 - ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN: Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perekonomian
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Perekonomian
3. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.

5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
6. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
7. Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
8. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata.
10. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian dan
11. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Perekonomian; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sasaran

Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran dlm lingkup rumpun perekonomian

Indikator

Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi

Sub Kegiatan

Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pemb. daerah bid. perekonomian

Sasaran Sub Kegiatan

Terlaksananya verifikasi Dokumen Perencanaan Mitra OPD Bidang Perekonomian

Sasaran Sub Kegiatan

Laporan Hasil Verifikasi (1 Laporan)

Meningkatnya capaian indikator tujuan dan sasaran misi 3 dalam RPJMD

Indikator

Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 3 dalam RPJMD yang tercapai

Sub Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perenc. Pembangunan perangkat Daerah bid. perekonomian

Sasaran Sub Kegiatan

Terlaksananya Monev Bidang Perekonomian

Indikator Sub Kegiatan

Laporan Monev (1 laporan)

Target Indikator Kinerja

[illegible]



POHON KINERJA KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA)

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

FUNGSI :

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Tugas di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
2. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Sumber Daya Alam.
3. Pengkajian, Pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, penanggaran pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
6. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
7. Pengkoordinasian, dan percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
10. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
11. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam ;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

SASARAN

Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Indikator

Persentasi Pelaksanaan Hasil Verifikasi (100 %)

SUB KEGIATAN

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

SASARAN

Terlaksananya Verifikasi RKA/DPA Mitra OPD Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Indikator

Laporan Hasil Verifikasi (1 Laporan)

Meningkatnya Kualitas Penyusunan dokumen teknis

Indikator

Persentasi Dokumen teknis yang dihasilkan (100 %)

SUB KEGIATAN

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

SASARAN

Tersedianya Dokumen Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Indikator

Dokumen Teknis (1 Dokumen)

Meningkatnya Capaian Target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan ke 3 dalam RPJMD

Indikator

Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi ke 2 dan ke 3 dalam RPJMD yang tercapai (90 %)

SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

SASARAN

Tersedianya monv bidang SDA

Indikator

Laporan Monev (1 Laporan)

Dasar Hukum

- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- ✓ Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan
- ✓ Peraturan Pemerintah RI NO 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
- ✓ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sub Bidang SDA
 - ✓ Perpres NO 61 /2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
 - ✓ Peraturan Menteri LHK Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - ✓ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Kementerian Dalam Negeri
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 - ✓ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - ✓ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - ✓ PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
 - ✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang mengamatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

TARGET INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN BIDANG SDA

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TUJUAN : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan			Nilai perencanaan dan pengukuran kinerja	%		55	55	55	55	55	55	
SASARAN : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja			Nilai perencanaan kinerja	%		100	100	100	100	100	100	
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah	%		90	90	90	90	90	90	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi	%		100	100	100	100	100	100	
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA	Laporan hasil verifikasi	Laporan		1	1	1	1	1	1	
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Teknis	Dokumen		1	1	1	1	1	1	
SASARAN : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja			Nilai pengukuran kinerja	%		100	100	100	100	100	100	
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%		100	100	100	100	100	100	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%		100	100	100	100	100	100	
	5.01.03.2.02.06	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang SDA	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Laporan		1	1	1	1	1	1	



GRAND DESIGN

PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Kabupaten Bengkulu Selatan



Kerjasama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dengan

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

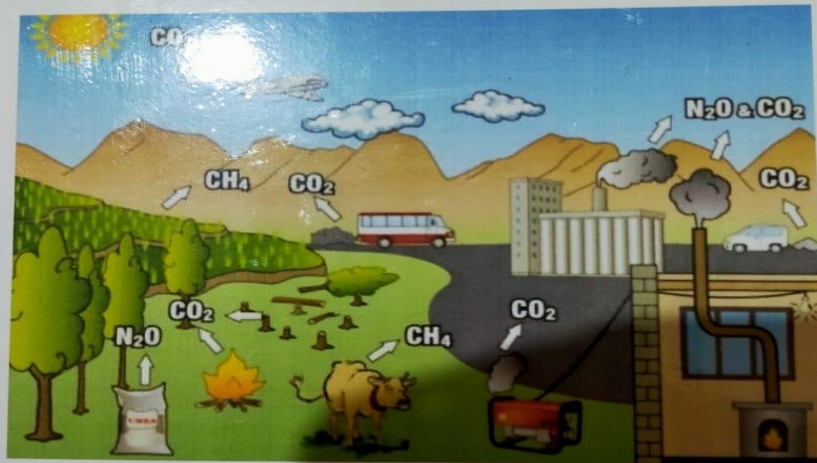
2020



LAPORAN PELAKSANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

GAS RUMAH KACA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2020



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

LAP. PELAKSANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
NO. GAS RUMAH
KACA
TA. 2020

The background features a series of horizontal bands in muted colors: light beige, olive green, light pink, orange, dark blue, and red. Abstract, hand-drawn style shapes are scattered across the bands, including small white circles in the top left, a large white 'U' shape in the top right, a cluster of small grey dashes on the right side, and various small orange and red shapes in the bottom bands.

POHON KINERJA KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan Perencanaan secara umum
 - ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - ✓ Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - ✓ Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dasar Hukum

- Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbid Infrastruktur
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Infrastruktur
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Infrastruktur
3. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan



6. Pengkoordinasian dan Pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
7. Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
8. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
10. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan
11. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

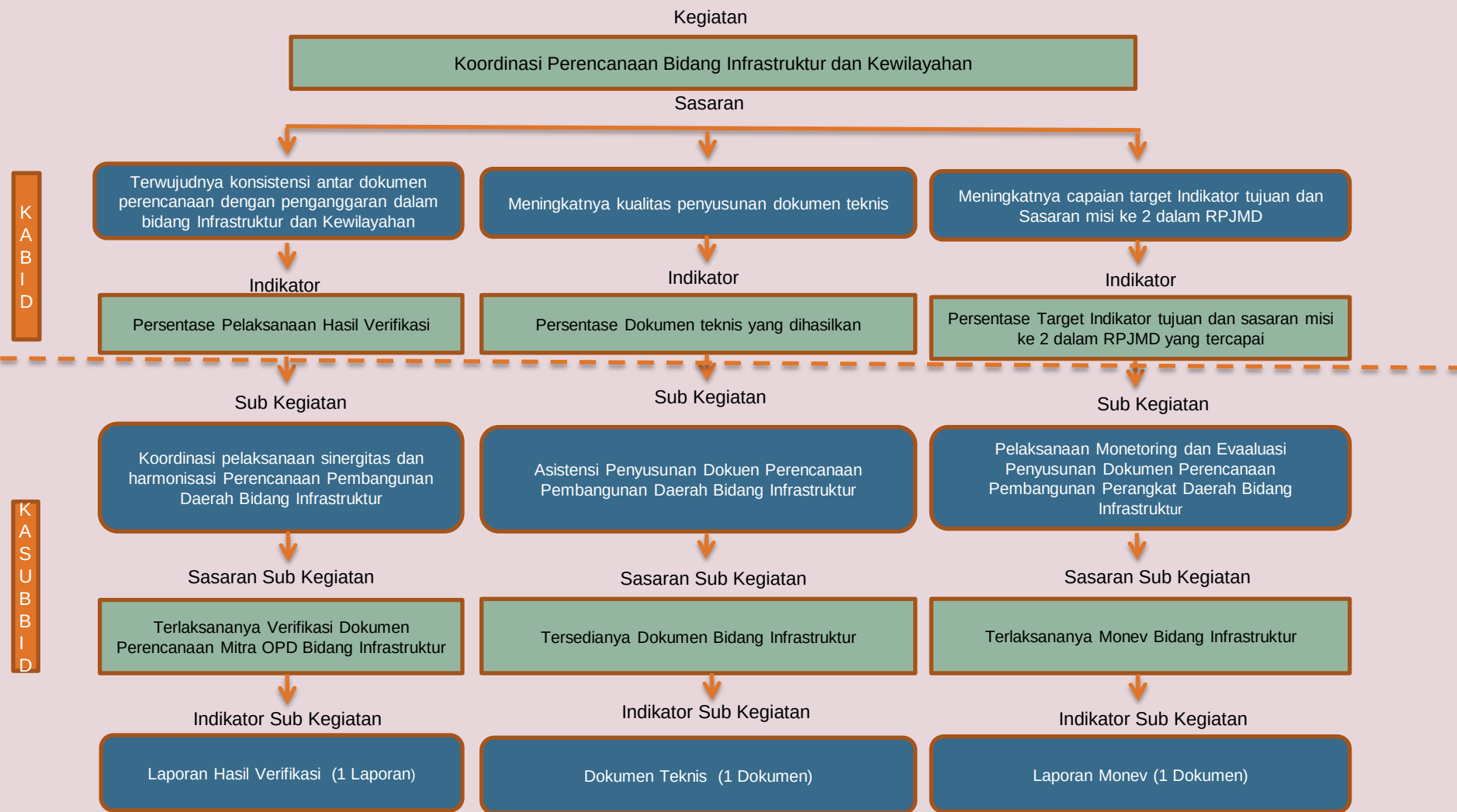
VISI

Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas Berlandaskan Cinta-BS

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi





Target Indikator Kinerja

TUJUAN/ SASARAN	KODE PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTCOME), SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TUJUAN :Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja					Nilai perencanaan dan pengukuran kinerja	%		34,28	40,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
SASARAN :Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja					Nilai perencanaan kinerja	%		20,29	25,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah	%			90	90	90	90	90	90
	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi	%				100	100	100	100	100	100
				Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan	%				100	100	100	100	100	100
	5.01.03.2.02.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.02.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen teknis	Dokumen				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi	%				100	100	100	100	100	100
				Persentase Dokumen teknis yang dihasilkan	%				100	100	100	100	100	100
	5.01.03.2.03.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil Verifikasi	Laporan				1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.03.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen teknis	Dokumen				1	1	1	1	1	1

Target Indikator Kinerja

TUJUAN/ SASARAN	KODE PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTCOME), SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
SASARAN :Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja				Nilai pengukuran kinerja	%		13,99	15,00	17,00	20	20	20	20	
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90	
	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1
	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dalam RPJMD yang tercapai	%			90	90	90	90	90	90
	5.01.03.2.03.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Monev	Laporan			1	1	1	1	1	1

KOMPONEN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

I. ASPEK EKOSISTEM INOVASI

1. PILAR DINAMIKA BISNIS :

- a. Regulasi (perizinan, SOP, dan lain-lain)
- b. Kewirausahaan

2. PILAR KAPASITAS INOVASI :

- a. Interaksi dan Keberagaman
- b. Penelitian dan Pengembang (Litbang)

3. PILAR KESIAPAN TEKNOLOGI :

- a. Telematika
- b. Teknologi

II. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

1. PILAR KELEMBAGAAN

- a. Tata Kelola Pemerintahan
- b. Keamanan dan Ketertiban

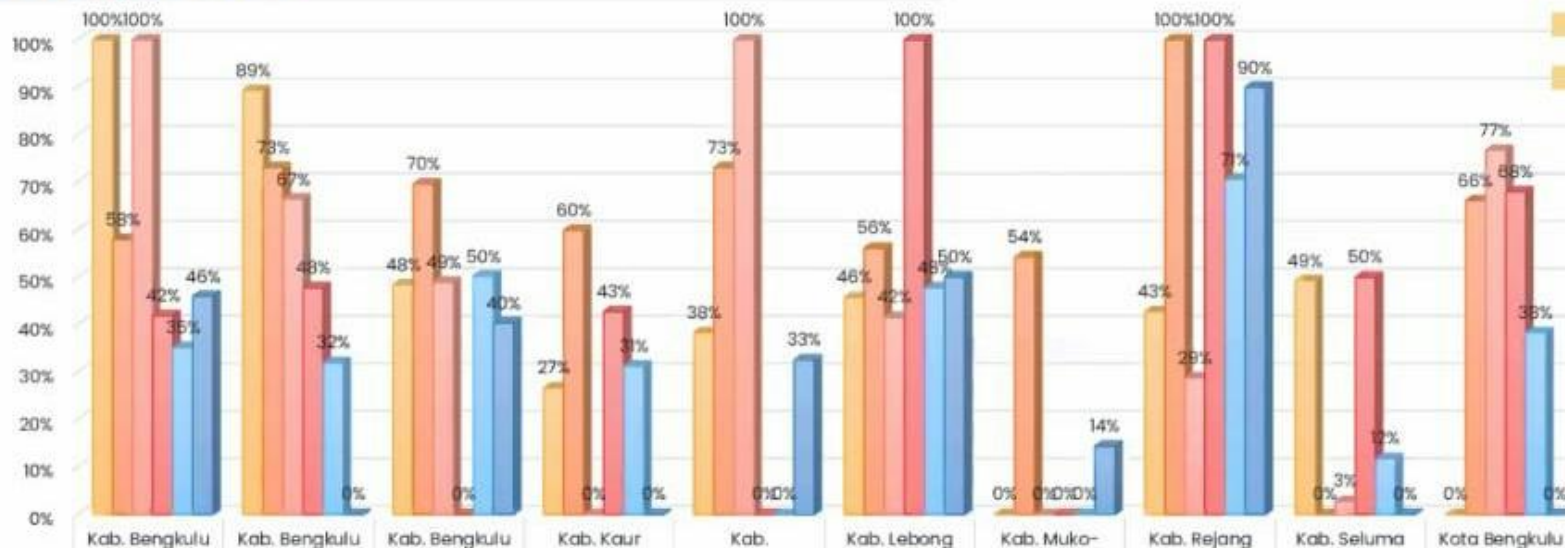
2. PILAR INFRASTRUKTUR

- a. Infrastruktur Transportasi
- b. Infrastruktur Air Bersih, RTH, dan Kelistrikan

3. PILAR PEREKONOMIAN DAERAH

- a. Keuangan Daerah
- b. Stabilitas Ekonomi

CAPAIAN SPM KAB/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU SELURUH BIDANG 2020



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa

PENGERTIAN

Perencanaan :

Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi, merumuskan sistem dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan untuk tercapainya tujuan

Proses penentuan hal-hal yang ingin dicapai serta penentuan berbagai tahapan yang diperlukan

Fungsi manajemen pertama yang penting, merupakan tahap awal dalam kegiatan sebuah organisasi

Penelitian :

Proses pemecahan masalah dengan melakukan pendekatan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis

Suatu cara yang sistematis yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan serta diuji

Pengembangan :

Proses menyebarkan/memperluas/mengembangkan sesuatu ke lokasi yang lebih luas/sasaran yang lebih luas

Litbang :

Proses atau langkah-langkah untuk produk atau temuan

URUTAN PROSES :

LIT = Penelitian

KAJI = Pengkajian

BANG = Pengembangan

LUH = Penyuluhan

RAP = Penerapan

Inovasi

- INOVASI TAHUN 2020

Sistem Pengarsipan Yang Mengadopsi Gramedia

- Latar belakang : Dokumen/Laporan di bidang PSI lebih dari 1000 pcs, sulit untuk mencari dokumen tersebut secara manual
- Seluruh dokumen/laporan di indentifikasi dan klasifikasikan berdasarkan sub bidang, selanjutnya diinput kedalam excel dengan di beri kode, termasuk penempatan dokumen (lemari, rak, dan dokumen diberi tempelan sesuai dengan inputan yang dilakukan.
- Aplikasinya, ketika mencari dokumen/laporan semuanya dengan mudah tinggal cek di laptop dokumen yang dimaksud lihat kode yang tertera cari di lemari yang sudah di beri kode.
- Guna mendukung pelaksanaan Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan idikator sasaran kepala OPD yaitu Nilai perencanaan kinerja

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur					
Sub Bidang Infrastruktur					
Dinas PUPR					
No	Kode	Uraian	Tahun Anggaran	Bidang	Keterangan
1	C.1.1	RKA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
2	C.1.2	RKA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
3	C.1.3	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
4	C.1.4	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
5	C.1.5	DPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
6	C.1.6	RKA SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
7	C.1.7	RKAP SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
8	C.1.8	DPPA SKPD DINAS PUPR	2019	INFRASTRUKTUR	
9	C.1.9	DPPA SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	
10	C.1.10	RKAP SKPD DINAS PUPR	2018	INFRASTRUKTUR	



Inovasi

- INOVASI YANG DIKEMBANGKAN TAHUN 2022

OPD AWARD (PENGHARGAAN OPD TERHADAP PERENCANAAN YANG BAIK)

- Bentuk Tim (Sk), Rapat Perumusan Juklak Dan Juknis
Tim ; Seluruh Bidang Bappeda Dan Opd Lain Menyesuaikan

- Penilaian : Perencanaan 60 %, Inovasi 40 %

PERENCANAAN 60 %

Kriteria :

- ✓ Renstra Terhadap RPJMD (Keselarasan) Sasaran, Sasaran Indikator, Program Dan Kegiatan (30)
- ✓ Renja Terhadap RKPD RPJMD (Keselarasan) Sasaran, Sasaran Indikator, Program Dan Kegiatan (30)
- ✓ Keselarasan Renja Dengan RKPD, KUA PPAS Dengan DPA (25)
- ✓ Sistematika Penulisan 9 (15)

Nilai Full(4 Kriteria) $100 \times 60 \% = 60$

INOVASI 40 %

Kriteria

- ✓ Sesuai Perbup I Bidang I Inovasi (40)
- ✓ Kelengkapan Dokumen Pendukung (30)
- ✓ Pelaksanaan Jalan/Tidak (30)

Nilai Full(3 Kriteria) $100 \times 40 \% = 40$

Kategori : OPD Nilai 0-50 (Kurang), >51-75 (Sedang), >76 Baik

3 Terbaik Mendapatkan Piala Dan Penghargaan Dan Uang

TUJUANNYA ADALAH

1. Mengapresiasi Kinerja OPD
2. Mewujudkan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dengan Indikator Sasaran Kepala Daerah Nilai Sakip
3. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Terbaik
4. Memacu Kinerja OPD Yang Mendapatkan Nilai Kurang Dan Sedang
5. Secara khusus untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tujuan dan sasaran daerah dengan tujuan dan sasaran opd , dengan kata lain sebagai alat ukur untuk mencapai indikator pada program di bidang PSI

Cara Perhitungan Indikator Kegiatan

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi

$$\frac{\text{OPD yang diverifikasi}}{\text{Target 8 OPD yang diverifikasi (Mitra bidang PSI)}} \times 100 \%$$

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
- Persentase Pelaksanaan Hasil Verifikasi

$$\frac{\text{OPD yang diverifikasi}}{\text{Target 4 OPD yang diverifikasi (Mitra bidang PSI)}} \times 100 \%$$

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Persentase Dokumen Teknis Yang Dihasilkan

$$\frac{\text{Dokumen yang dibuat tahun berkenan (Masterplan, Kajian, DED, dll)}}{\text{Target dokumen yang dibuat (Bidang Ekonomi Dan SDA)}} \times 100 \%$$

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
- Persentase Dokumen Teknis Yang Dihasilkan

$$\frac{\text{Dokumen yang dibuat tahun berkenan (Masterplan, Kajian, DED, dll)}}{\text{Target dokumen yang dibuat (Infrastruktur)}} \times 100 \%$$

Cara Perhitungan Indikator Kegiatan

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai

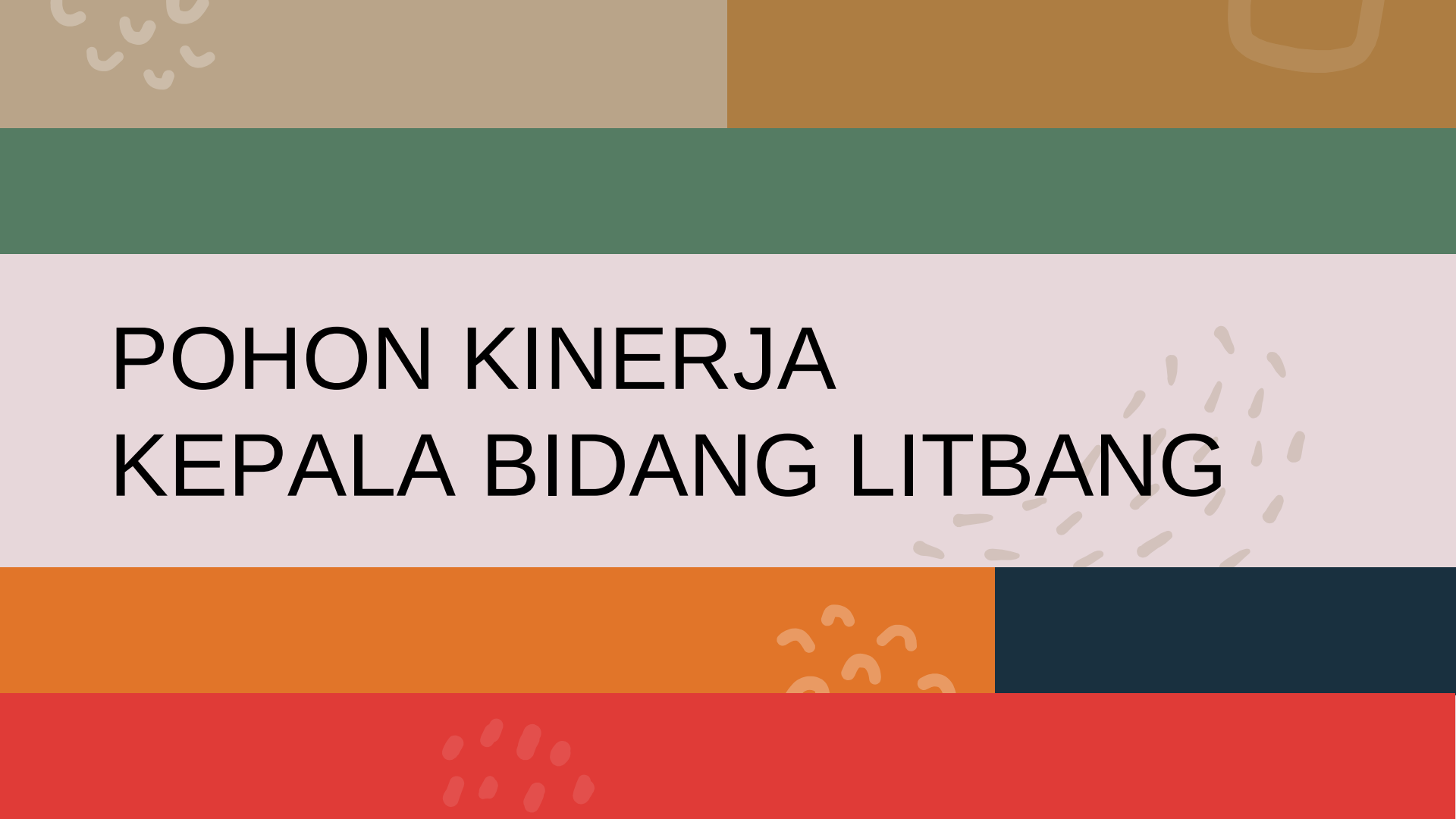
Target indikator tujuan & sasaran yang tercapai pada misi 2 dan 3 (DLHK, Pertanian, Perikanan, Perindagkop, Pariwisata, DPMPTSP, Ketahanan Pangan)

Target keseluruhan UPD Mitra PSI yang tertuang X 100 %
dalam RPJMD

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
- Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dalam RPJMD yang tercapai

Target indikator tujuan & sasaran yang tercapai pada misi 2 dan 3 (PUPR, Perkim, Dishub, BPBD)

Target keseluruhan UPD Mitra PSI yang tertuang X 100 %
dalam RPJMD

The background features a series of horizontal bands in muted colors: light beige, olive green, light pink, orange, and red. Abstract, hand-drawn style shapes are scattered across the bands, including small white circles in the top left, a large white 'U' shape in the top right, a cluster of small grey dashes on the right side, and various small orange and red shapes in the bottom bands.

POHON KINERJA KEPALA BIDANG LITBANG

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

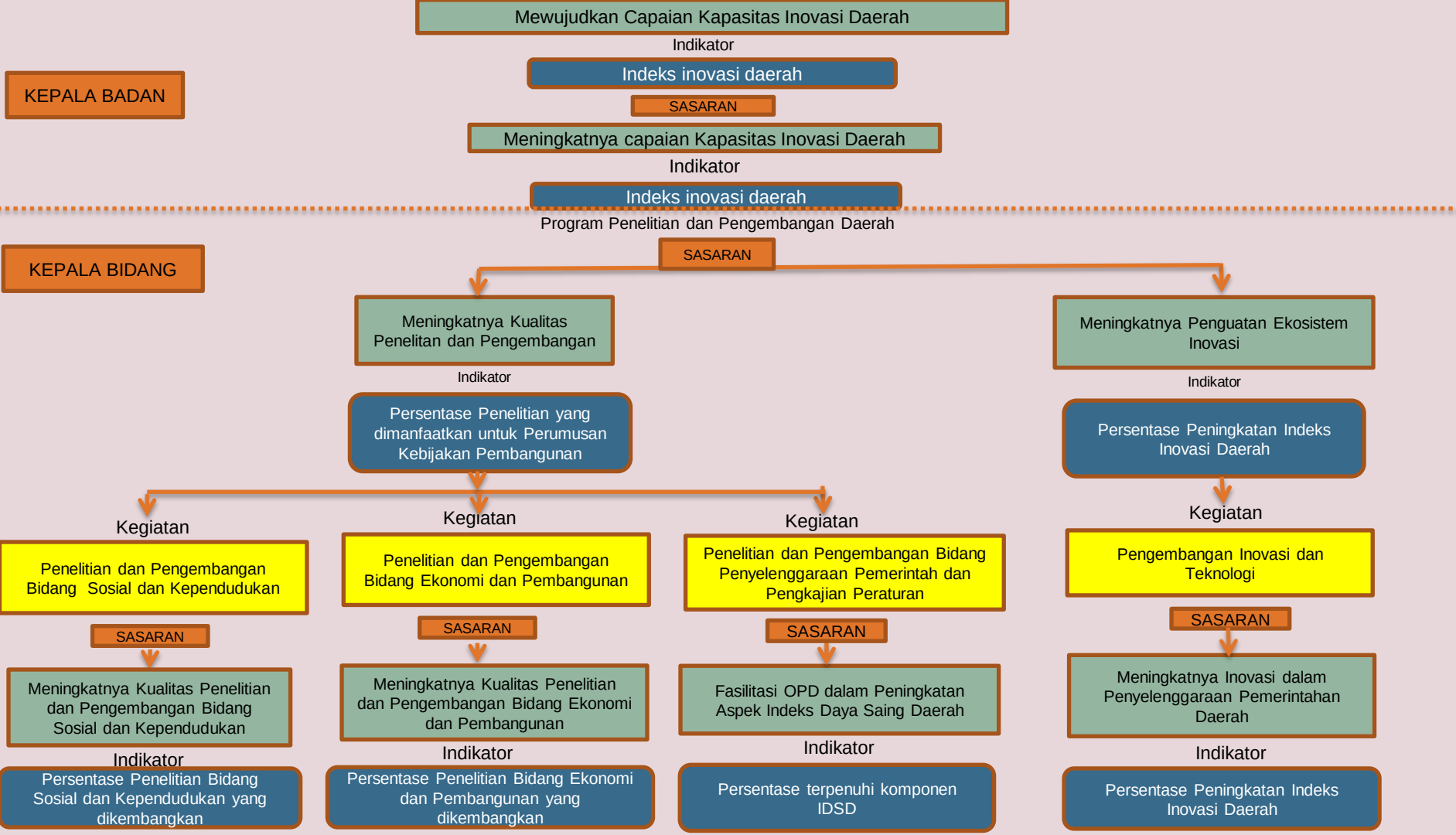
KEPALA BIDANG LITBANG : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
4. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
5. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
7. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
10. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
11. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.



TARGET KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR	AWAL	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	INDEKS DAYA SAING DAERAH	2,1410/Sedang 42,8 %	2,51/Tinggi ↑ 7,8%	3,00/Tinggi ↑ 10%	3,50/Tinggi ↑ 10%	3,76/Sangat Tinggi ↑ 5%	4,00/Sangat Tinggi ↑ 5%
2	INDEKS INOVASI DAERAH	50,0/Inovatif 50 %	60,0/Sangat Inovatif ↑ 10%	65,0 ↑ 5%	70,0 ↑ 5%	75,0 ↑ 5%	80,0 ↑ 5%
3	VARIETAS TANAMAN LOKAL UNGGUL YANG TERDAFTAR	8 Varietas	+2 Varietas (25%)	+2 Varietas (25%)	+3 Varietas (37,5%)	+3 Varietas (37,5%)	+4 Varietas (50%)

EVIDANCE BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1	SERTIFIKAT VARIETAS TANAMAN LOKAL UNGGUL	KELAPA MANNA KUNING
		KELAPA MANNA HIJAU
		JERUK SEGINIM
		PADI SIUNG KANCIL
		PADI TAMBUN
		PADI ABANG PINTAL
		PADI ABANG MUMBANG
		PADI BURUNG
2	EVALUASI KAJIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BENGKULU SELATAN 2016-2019	
3	PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH TAHUN 2021	
4	MOU/KERJASAMA DENGAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU	

KOMPONEN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

I. ASPEK EKOSISTEM INOVASI

1. PILAR DINAMIKA BISNIS :

- a. Regulasi (perizinan, SOP, dan lain-lain)
- b. Kewirausahaan

2. PILAR KAPASITAS INOVASI :

- a. Interaksi dan Keberagaman
- b. Penelitian dan Pengembang (Litbang)

3. PILAR KESIAPAN TEKNOLOGI :

- a. Telematika
- b. Teknologi

II. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

1. PILAR KELEMBAGAAN

- a. Tata Kelola Pemerintahan
- b. Keamanan dan Ketertiban

2. PILAR INFRASTRUKTUR

- a. Infrastruktur Transportasi
- b. Infrastruktur Air Bersih, RTH, dan Kelistrikan

3. PILAR PEREKONOMIAN DAERAH

- a. Keuangan Daerah
- b. Stabilitas Ekonomi

III. ASPEK SUMBERDAYA/HUMAN CAPITAL

1. PILAR KESEHATAN :

- a. Kesehatan

2. PILAR PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN :

- a. Pendidikan

- b. Keterampilan

IV. ASPEK PASAR/MARKET

1. PILAR EFISIENSI PASAR PRODUK :

- a. Kompetensi Dalam Negeri

- b. Stabilitas Harga

2. PILAR KETENAGAKERJAAN :

- a. Ketenagakerjaan

- b. Kapasitas Tenaga Kerja

3. PILAR AKSES KEUANGAN :

- a. Akses Keuangan

4. PILAR UKURAN PASAR

Sumber :
“RISTEK-BRIN”

KOMPONEN INDEKS INOVASI DAERAH

1. REGULASI DAERAH
2. KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI
3. DUKUNGAN ANGGARAN
4. PENGGUNAAN IT
5. BIMTEK INOVASI
6. PROGRAM DAN KEGIATAN DI RENSTRA OPD
7. JEJARING INOVASI
8. REPLIKASI
9. PEDOMAN TEKNIS
10. PENGELOLA INOVASI
11. KETERSEDIAAN INFORMASI LAYANAN
12. PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN
13. TINGKAT PARTISIPASI STAKE HOLDER
14. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN
15. KEMUDAHAN PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
16. ONLINE SYSTEM
17. KECEPATAN INOVASI
18. KEMANFAATAN INOVASI

PENGERTIAN

Penelitian :

Proses pemecahan masalah dengan melakukan pendekatan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis

Suatu cara yang sistematis yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan serta diuji

Pengembangan :

Proses menyebarkan/memperluas/mengembangkan sesuatu ke lokasi yang lebih luas/sasaran yang lebih luas

Litbang :

Proses atau langkah-langkah untuk produk atau temuan

URUTAN PROSES :

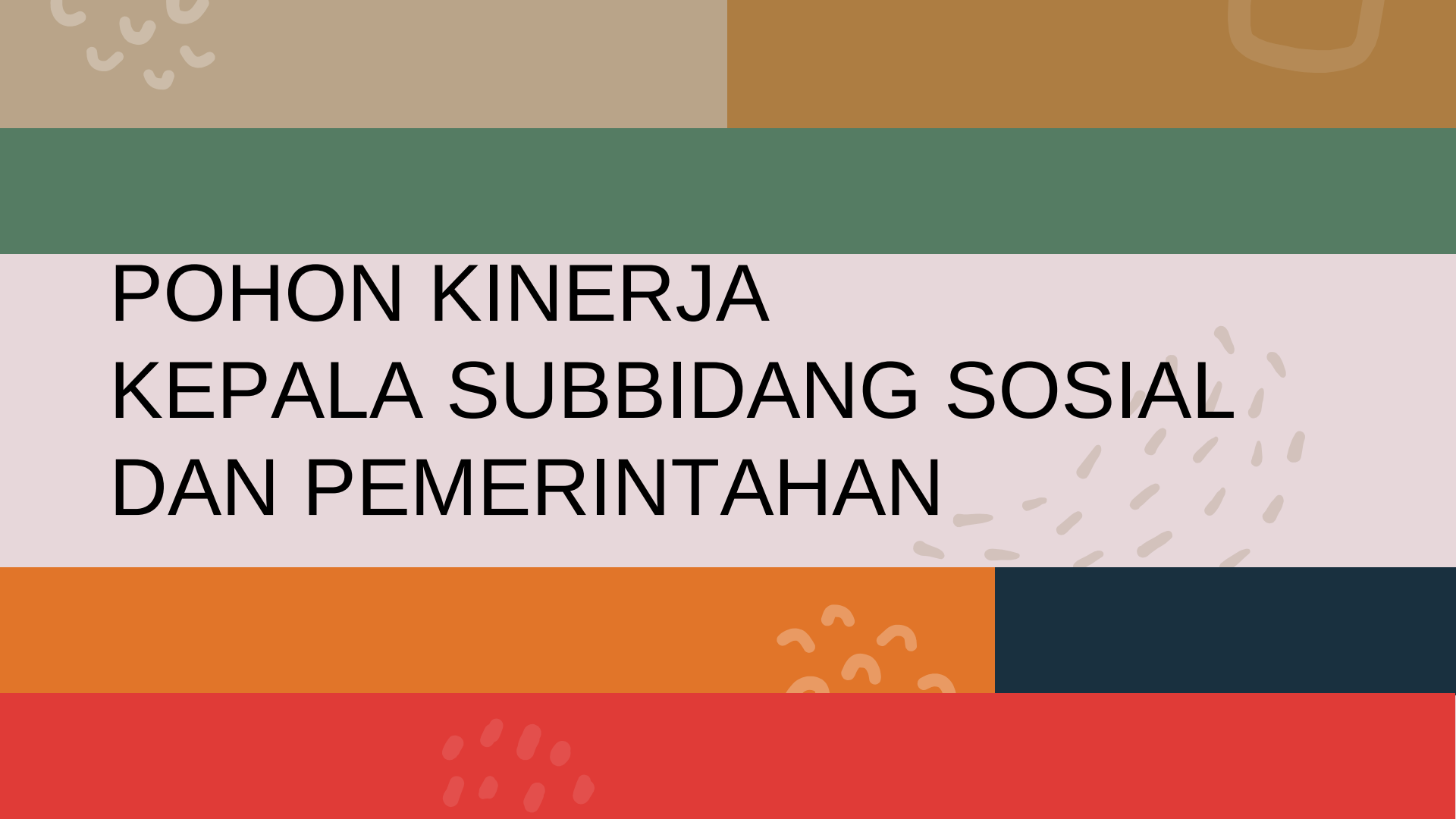
LIT = Penelitian

KAJI = Pengkajian

BANG = Pengembangan

LUH = Penyuluhan

RAP = Penerapan



POHON KINERJA KEPALA SUBBIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

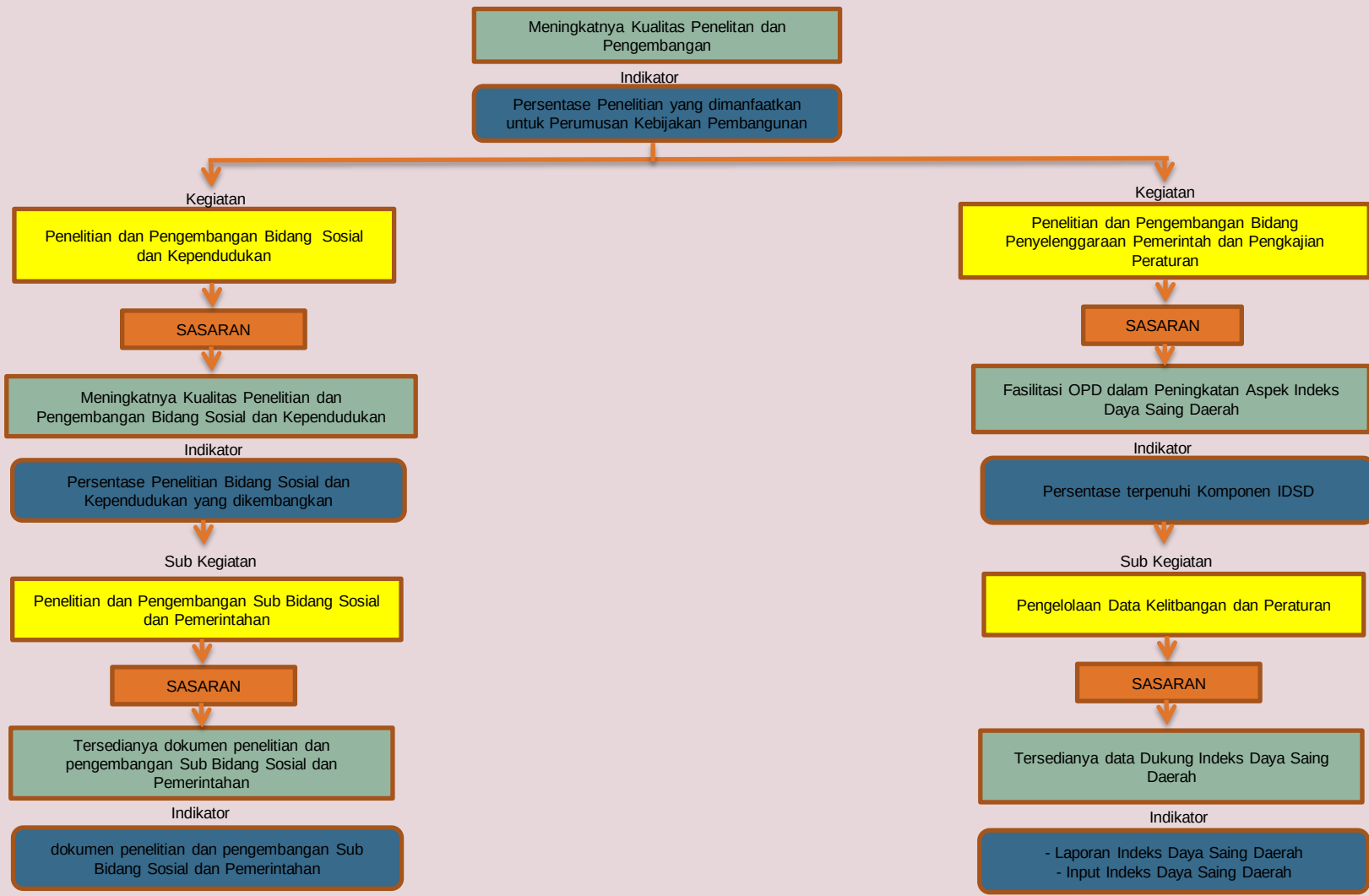
Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan : Perbup No. 51 Tahun 2016

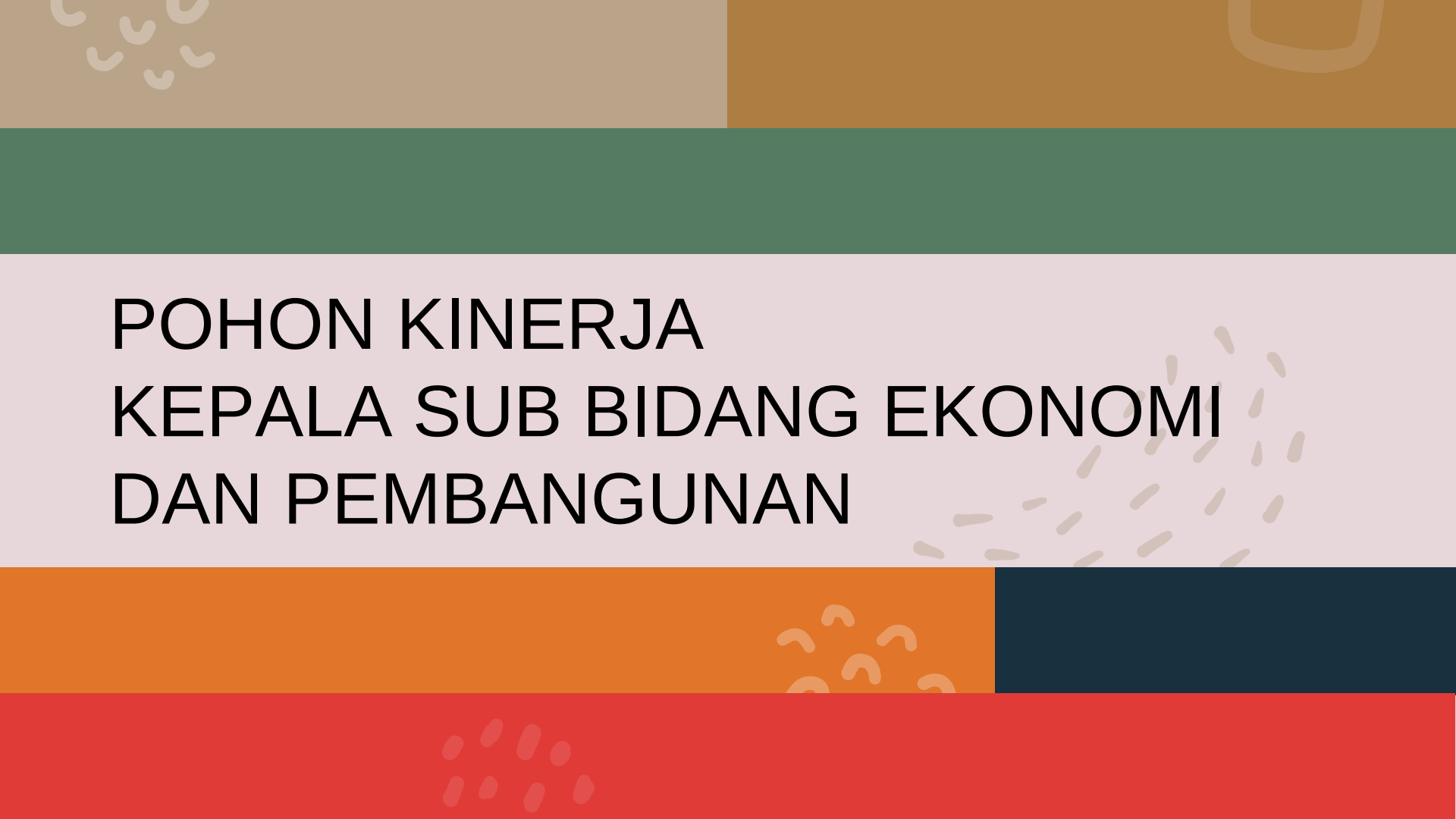
TUGAS :

Melaksanakan Penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan

FUNGSI :

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- Penyusunan dan Pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- Penyiapan Bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan
- Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang Sosial dan Pemerintahan.
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang Sosial dan Pemerintahan
- Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan dibidang Sosial dan Pemerintahan
- Fasilitasi Pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Indonesia dan Asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
- Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan atasan





POHON KINERJA KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di sub bidang ekonomi dan pembangunan,
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar kelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bidang ekonomi dan pembangunan,
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan,
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan,
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi pembangunan,
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan,
7. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan,
8. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan pembangunan,
9. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang ekonomi dan pembangunan ;dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.



POHON KINERJA
KEPALA SUB BIDANG
INOVASI DAN TEKNOLOGI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI : Perbup No. 51 Tahun 2016

TUGAS :

Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

FUNGSI

1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
4. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
5. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
6. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
7. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
8. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
9. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
10. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang inovasi dan teknologi; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

